

**Pengaruh Perlindungan Hukum, *Personal Cost of Reporting*, Saluran
Pelaporan Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat
Whistleblowing dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi**



Nama: Virgina Septianhie

No. Mahasiswa: 21312144

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**Pengaruh Perlindungan Hukum, *Personal Cost of Reporting*, Saluran
Pelaporan Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat
Whistleblowing dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Virgina Septianhie

No. Mahasiswa: 21312144

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi, ataupun tiruan dari karya orang lain, baik itu sebagian maupun seluruhnya, kecuali yang secara tertulis saya cantumkan sumbernya dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a pink and yellow 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features a Garuda emblem and the text 'METRAN 1000'.

Virgina Septianhie

HALAMAN PENGESAHAN

**Pengaruh Perlindungan Hukum, *Personal Cost of Reporting*, Saluran
Pelaporan Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat
Whistleblowing dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Virgina Septianhie

No. Mahasiswa: 21312144

Yogyakarta, Mei 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing,



Dekardurumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CfrA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Perlindungan Hukum, Personal Cost of Reporting, Saluran Pelaporan Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat Whistleblowing dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi

Disusun oleh : VIRGINA SEPTIANHIE

Nomor Mahasiswa : 21312144

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 10 Juni 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFra.

Penguji : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”

(QS At Taubah : 40)

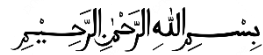
HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:
Orang tua dan Saudara-saudaraku tersayang atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah habis.

Dosen Pembimbing, seluruh dosen di Program Studi Akuntansi, dan Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini. Terima kasih atas bimbingan, kebersamaan, semangat, dan dukungan yang luar biasa.

Almamater tercinta, yang telah menjadi tempat saya tumbuh, belajar, dan berkembang.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Pengaruh Perlindungan Hukum, Personal cost of reporting, Saluran Pelaporan Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat Whistleblowing dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi.*" Disusun dengan baik untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat kelulusan Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di universitas ini.
2. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E.,M.Si.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, atas dukungan dan arahnya selama masa studi.
3. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E.,S.H.,M.Sc.,Ph.D.,SAS,ASPM, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si.,M.Com.(SI)., Ph.D, selaku pembimbing utama dan pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan yang berharga selama proses penulisan skripsi ini.
5. Pimpinan dan Staf Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Yogyakarta.
6. Keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti kepada penulis.
7. Rasa syukur yang juga tak kunjung usai untuk Panggi Rahmawan Sanjaya, atas segala dukungan serta doa yang selalu menyertai.
8. Grup teman-teman seperjuangan, Tamasya, mangats mahasiswa, IDSC, Kuda Liar, Kurma, dan nama-nama lain yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.
9. Seluruh dosen dan juga staf FBE UII atas segala bantuan yang diberikan untuk kelancaran tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, tata kelola, dan *whistleblowing* di sektor publik.

Demikian, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Mei 2025

(Penulis)

Virgina Septianhie

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Theory of Planned Behaviour	14
2.2 Fraud	16
2.3 Niat Whistleblowing.....	16
2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat <i>Whistleblowing</i>	17
2.4.1 Perlindungan Hukum.....	17
2.4.2 Saluran Pelaporan Anonim	18
2.4.3 Tingkat Keseriusan Kecurangan	19
2.4.4 Personal Cost of Reporting.....	19
2.4.5 Religiusitas	20
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	31
2.6.1 Pengaruh Perlindungan Hukum Terhadap Niat <i>Whistleblowing</i>	31

2.6.2 Pengaruh Saluran Pelaporan Anonim Terhadap Niat <i>Whistleblowing</i> ...	32
2.6.3 Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat <i>Whistleblowing</i>	33
2.6.4 Pengaruh Personal Cost of Reporting Terhadap Niat <i>Whistleblowing</i> ...	34
2.6.5 Religiusitas Memoderasi Hubungan <i>Personal Cost of Reporting</i> dengan Niat <i>Whistleblowing</i>	34
2.7 Model Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Metodologi Penelitian	37
3.2 Populasi dan Sampel	37
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	39
3.4.1 Perlindungan Hukum	40
3.4.2 Saluran Pelaporan Anonim	41
3.4.3 Tingkat Keseriusan Kecurangan	41
3.4.4 Personal cost of reporting	42
3.4.5 Religiusitas	43
3.4.6 Niat <i>Whistleblowing</i>	43
3.5 Metode Analisis Data	44
3.5.1 Metode Structural Equation Model (SEM).....	44
3.5.2 Model Pengukuran	45
3.5.2.1 Uji Validitas	45
3.5.2.2 Uji Reliabilitas	46
3.5.3 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	46
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	47
3.5.3.2 PLS Predict.....	47
3.5.3.3 Uji Goodness of Fit (GoF).....	47
3.5.3.4 Uji T-Statistik.....	48
3.5.3.5 Path Coefficient	48
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	50
4.1 PL Test.....	50
4.1.1 Uji Validitas Pilot Test.....	50
4.1.2 Uji Reliabilitas Pilot Test.....	51
4.2 Hasil Pengumpulan Data	52

4.3 Hasil Data Responden	53
4.3.1 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
4.3.2 Berdasarkan Usia	54
4.3.3 Berdasarkan Pendidikan	54
4.3.4 Berdasarkan Jabatan.....	55
4.3.5 Berdasarkan Jenis Organisasi Pemerintah Daerah	56
4.3.6 Berdasarkan Masa Kerja.....	56
4.4 Hasil Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	57
4.4.1 Uji Validitas	57
4.4.1.1 Uji Validitas Konvergen	57
4.4.1.2 Uji Validitas Diskriminan.....	59
4.4.2 Uji Reliabilitas	61
4.5 Hasil Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	61
4.5.1 Koefisien Determinasi (<i>R-Squared</i>)	62
4.5.2 PLS Predict	63
4.5.3 Goodness of Fit (GoF).....	63
4.6 Pengujian Hipotesis.....	64
4.7 Pembahasan Hipotesis	66
4.7.1 Pengaruh Perlindungan Hukum Terhadap Niat Whistleblowing	66
4.7.2 Pengaruh Saluran Pelaporan Anonim Terhadap Niat <i>Whistleblowing</i> ...	68
4.7.3 Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat <i>Whistleblowing</i>	70
4.7.4 Pengaruh Personal Cost of Reporting Terhadap Niat Whistleblowing...	71
4.7.5 Religiusitas Memoderasi Hubungan <i>Personal Cost of Reporting</i> dengan Niat <i>Whistleblowing</i>	73
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kontribusi dan Implikasi Penelitian	77
5.2 Keterbatasan Penelitian	79
5.3 Rekomendasi Penelitian Lanjutan.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2.1 Lanjutan.....	23
Tabel 3.2 Indikator Perlindungan Hukum.....	40
Tabel 3.3 Indikator Saluran Pelaporan Anonim	41
Tabel 3.4 Indikator Tingkat Keseriusan Kecurangan	42
Tabel 3.5 Indikator Personal cost of reporting	42
Tabel 3.6 Indikator Religiusitas	43
Tabel 3.7 Indikator Niat Whistleblowing.....	44
Tabel 4.1 Rekapitulasi Uji Validitas Responden Tahap awal	50
Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Pilot Test.....	52
Tabel 4.3 Hasil Penyebaran Kuisioner.....	53
Tabel 4.4 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 4.5 Klasifikasi Berdasarkan Usia	54
Tabel 4.6 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan.....	54
Tabel 4.7 Klasifikasi Berdasarkan Jabatan.....	55
Tabel 4.8 Klasifikasi Berdasarkan OPD	56
Tabel 4.9 Klasifikasi Berdasarkan Masa Kerja	57
Tabel 4.10 Uji Validitas Konvergen.....	58
Tabel 4.11 Cross-Loading	59
Tabel 4.12 Fornell-Larcker Criterion.....	60
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.14 R-Squared	62
Tabel 4.15 PLS Predict	63
Tabel 4.16 Pengujian Hipotesis	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 TPB Framework, Ajzen (1991).....	15
Gambar 2.2 Model Penelitian	36

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh perlindungan hukum, *personal cost of reporting*, saluran pelaporan anonim, dan tingkat keseriusan kecurangan terhadap niat *whistleblowing* pegawai OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta, serta peran religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan Teknik analisis PLS-SEM pada 166 responden. Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Namun, religiusitas tidak memoderasi hubungan antara *personal cost of reporting* dan niat *whistleblowing*.

Kata kunci: *Whistleblowing*, Perlindungan Hukum, *Personal cost of reporting*, Saluran Pelaporan Anonim, Keseriusan Kecurangan, Religiusitas.

ABSTRACT

This study examines the influence of legal protection, personal cost of reporting, anonymous reporting channels, and the seriousness of fraud on whistleblowing intentions among local government employees in Yogyakarta City. It also explores the moderating role of religiosity. A quantitative method was applied using PLS-SEM analysis on data from 166 respondents. The results show that all independent variables have a positive and significant effect on whistleblowing intentions. However, religiosity does not moderate the relationship between personal cost of reporting and whistleblowing intention.

Keywords: *Whistleblowing, Legal Protection, Personal cost of reporting, Anonymous Channels, Fraud Seriousness, Religiosity.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat *fraud* di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan survei oleh *Association of Certified Fraud Examiners*, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan kasus *fraud* terbanyak di *Asia Pacific Region Territory* (ACFE, 2024). *Fraud* terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi, penggelapan anggaran, hingga penyalahgunaan wewenang. Survei ACFE Indonesia *Chapter* tahun 2019 juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah bentuk *fraud* yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia, disusul oleh kasus penyalahgunaan aset. Pelaku kecurangan biasanya memiliki jabatan, kedudukan, wewenang, serta kesempatan untuk mengelola keuangan dan laporan keuangan (Baruwati & Fathmaningrung, 2023).

Whistleblowing memang penting dan telah diakui secara luas sebagai mekanisme deteksi dan juga pencegahan *fraud*, namun pengaplikasian sistem ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Studi terbaru menunjukkan bahwa masih sedikit lembaga pemerintahan di Indonesia yang memiliki ketentuan internal yang sejalan dengan praktik terbaik internasional, bahkan ada pula yang tidak didukung sama sekali. Tampaknya implementasi *whistleblowing system* di beberapa instansi cenderung bersifat prosedural semata, dibangun sekedar hanya untuk kelengkapan prosedur saja (Pramono & Aruzzi, 2023).

Organisasi yang paling dirugikan karena *fraud* adalah pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah menginisiasi Pembangunan Zona Integritas untuk mengatasi kasus *fraud* di lingkungan pemerintahan, dengan mewajibkan setiap instansi menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (Baruwati & Fathmaningrung, 2023). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas. Salah satu elemen dalam upaya ini adalah penggunaan *whistleblowing system* sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan. Fenomena *fraud* di Indonesia semakin menantang di era revolusi *industry* 4.0, perubahan digital yang cepat membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol.

Namun, efektivitas pengawasan internal masih menghadapi tantangan besar. Contohnya, kasus korupsi ganti rugi tol Padang-Pekanbaru yang melibatkan 11 tersangka menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyimpangan di lingkungan pemerintahan (Kompas, 2023). Selain itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdapat lima kasus dugaan korupsi tanah kalurahan yang sedang dalam tahap penyidikan sepanjang 2024. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pemberdayaan mekanisme pelaporan, termasuk *whistleblowing system*, untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini (Kumparan, 2024).

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengambil langkah konkret untuk mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, termasuk melalui penguatan sistem pelaporan yang melibatkan *whistleblowing*

system. Seperti yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 404 Tahun 2016, pemerintah kota berkomitmen melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam seluruh aktivitas pemerintahan daerah. Langkah-langkah ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi, serta penguatan sistem pengendalian internal untuk memastikan komitmen tersebut tercapai. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, keluhan, dan aduan guna memastikan pelayanan publik tetap optimal. Sebagai pelengkap dari sistem pengaduan masyarakat melalui UPIK, penerapan *whistleblowing system* diperlukan untuk menangani laporan dari dalam organisasi. Diharapkan *whistleblowing system* dapat mendeteksi penyimpangan lebih awal, meningkatkan integritas pegawai, serta memberikan masukan bagi manajemen untuk memperbaiki pengendalian internal.

Dalam mendeteksi *fraud*, kita tidak bisa hanya mengandalkan sistem pengawasan internal. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pegawai di lingkungan pemerintah sendiri. Keterlibatan ini penting karena pelaku kecurangan sering kali berada di dalam organisasi itu sendiri, sehingga pegawai yang mengetahui adanya kecurangan menjadi kunci penting dalam mengungkapkan kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sarana yang dapat memfasilitasi pegawai untuk melaporkan dugaan kecurangan tanpa takut akan adanya konsekuensi negatif. *Whistleblowing system* adalah salah satu mekanisme yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam konteks ini, Pemilihan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian didasarkan pada komitmen kuat pemerintah kota ini dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, seperti yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan implementasi sistem pengawasan internal, termasuk *whistleblowing system*. Selain itu, keberadaan *whistleblowing system* di Yogyakarta menjadi langkah strategis untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas yang sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memberikan model tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia, khususnya dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*.

Whistleblowing system telah menjadi salah satu sarana penting dalam mengungkap *fraud* di berbagai instansi di Indonesia. Melalui *whistleblowing system*, beberapa kasus *fraud* berhasil terungkap. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kasus Enron. Kasus utang yang tidak dilaporkan sebesar 1 miliar dolar terungkap di Enron. Diduga Enron dan KAP Andersen melakukan pelanggaran hukum dengan menghancurkan dokumen-dokumen terkait. Sherron Watkins selaku wakil presiden perusahaan, terdorong oleh skandal ini untuk menjadi *whistleblower* dan mengungkap pelanggaran yang terjadi di perusahaan publik tersebut (Sukarya, 2024).

Salah satu kasus *fraud* yang di ungkap melalui *whistleblowing* di Indonesia melibatkan Komjen Susno Duadji, mantan KABARESKRIM POLRI. Susno Duadji mengungkapkan adanya mafia hukum yang terkait dengan Gayus Tambunan, seorang pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak,

yang terlibat dalam kasus pencucian uang dan korupsi senilai puluhan miliar. Selain itu, terdapat juga kasus suap yang melibatkan Bank Indonesia saat penentuan Deputy Senior BI pada waktu itu, yang kemudian kasus ini diungkap oleh Agus Condro (Indriasih 2021). Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya peran *whistleblower* dalam mengungkap praktik korupsi dan kejahatan lainnya, terutama di lembaga-lembaga pemerintahan. Pada penelitian yang dilakukan Chandraini *et al.* (2023) menguji faktor-faktor yang memengaruhi niat *whistleblowing* terhadap sebuah organisasi dengan menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991).

Penelitian mengenai intensi *whistleblowing* telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai teori sebagai landasan. Beberapa teori yang sering digunakan meliputi *Prosocial Behaviour Theory*, *Theory of Planned Behaviour*, dan *Fraud Triangle Theory*. *Prosocial Behaviour Theory* diterapkan dalam penelitian oleh Hertati dan Puspitawati (2023); serta Rahayu dan Astuti (2023). Sementara itu, *Theory of Planned Behaviour* digunakan oleh Annisa dan Nurlaeli (2022); Mike dan Ajang (2022); Suhartini, *et al.* (2023); Liani dan Helmayunita (2024); Ainun, *et al.* (2021); Alwi dan Helmayunita (2020); Salfitri dan Coryanata (2024); Islami dan Kurniawati (2023); Putri, *et al.* (2024); Hastuti, *et al.* (2023); serta Chandraini, *et al.* (2023). Adapun *Fraud Triangle Theory* digunakan oleh Oktaviani *et al.* (2024). Berdasarkan studi-studi sebelumnya, penelitian ini menggunakan kerangka *Theory of Planned Behaviour* yang mencakup konstruksi niat, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, yang memfasilitasi untuk mengkaji niat seseorang dalam melakukan

whistleblowing. *Theory of Planned Behaviour* digunakan sebagai landasan penelitian ini karena teori ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat individu dalam bertindak, termasuk dalam konteks *whistleblowing*. Dalam penelitian ini akan digunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) sebagai landasan teoritis, dengan menggunakan faktor-faktor yakni perlindungan hukum, *personal cost of reporting*, saluran pelaporan anonim dan tingkat keseriusan kecurangan.

Perlindungan Hukum adalah langkah untuk memberikan bantuan dan memastikan terpenuhinya hak-hak individu, baik saksi maupun korban, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi mereka (Soekanto, 1984). Variabel perlindungan hukum bagi *whistleblower* menjadi krusial karena tanpa jaminan perlindungan yang memadai, banyak individu yang ragu untuk melaporkan tindakan melanggar hukum akibat takut akan ancaman, intimidasi, atau bahkan balas dendam dari pihak-pihak yang terlibat. Selain perlindungan hukum, *personal cost of reporting* juga sangat berkaitan dengan keberanian seseorang untuk menjadi *whistleblower*. Meskipun perlindungan hukum yang kuat dapat mengurangi rasa takut akan ancaman atau balas dendam, individu sering kali dihadapkan dengan risiko pribadi seperti kehilangan pekerjaan atau kerugian finansial. Studi oleh Effendi dan Nuraini (2019) menyatakan bahwa perlindungan hukum berpengaruh positif terhadap intensi *whistleblowing*, peningkatan yang terjadi pada perlindungan hukum berpengaruh meningkatkan intensi *whistleblowing*.

Saluran Pelaporan Anonim merupakan sebuah mekanisme yang digunakan seseorang untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan dalam

organisasi tanpa mengungkapkan identitas aslinya, melainkan dengan menggunakan identitas samaran atau anonim (Sholihun & Yanti, 2021). Keberadaan saluran ini sangat penting dalam mendorong individu untuk melaporkan kecurangan, terutama di lingkungan yang mungkin tidak mendukung atau di mana risiko pembalasan tinggi. Studi oleh Akbar dan Yonnedi (2023) menemukan bahwa adanya saluran pelaporan anonim secara signifikan meningkatkan niat individu untuk melakukan *whistleblowing*, karena mereka merasa lebih aman untuk melaporkan tindakan yang mereka ketahui. Selain itu, hal lain yang dapat memengaruhi niat *whistleblowing* adalah tingkat keseriusan kecurangan.

Tingkat Keseriusan Kecurangan merujuk pada penilaian individu terhadap dampak dan konsekuensi dari tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Variabel ini menjadi penting karena semakin serius suatu kecurangan, semakin besar potensi kerugian yang dapat ditimbulkan, baik bagi organisasi maupun individu yang terlibat. Menurut Winardi (2013), Tingkat keseriusan kecurangan dapat dinilai seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh kecurangan tersebut, dan hal ini memengaruhi keputusan individu untuk melakukan *whistleblowing*. Ketika kecurangan dianggap serius dan dapat merugikan banyak pihak, individu lebih cenderung untuk melaporkan tindakan tersebut dengan harapan dapat menghentikan kerugian lebih lanjut. Tingkat keseriusan kecurangan dapat memengaruhi sikap terhadap perilaku *whistleblowing*.

Personal cost of reporting (Biaya Pelaporan Pribadi) menurut Schultz et. al. (1993) adalah penilaian karyawan atau anggota organisasi tentang risiko pembalasan, balas dendam, atau sanksi yang mungkin mereka hadapi dari pihak yang dilaporkan setelah melaporkan kecurangan atau dugaan dalam organisasi. Ketakutan terhadap ancaman balas dendam dapat menjadi penghambat utama dalam pengungkapan kecurangan. Seorang pegawai yang menyadari adanya tindakan kecurangan mungkin enggan untuk melaporkannya karena khawatir akan konsekuensi berupa balas dendam akibat tindakannya. Oleh karena itu, semakin besar persepsi seseorang terhadap risiko balas dendam, semakin kecil kemungkinan individu tersebut untuk mengungkapkan kecurangan yang diketahuinya (Mustopa, *et al.*, 2020). Untuk mengurangi risiko pribadi yang dihadapi *whistleblower*, religiusitas bisa berperan untuk membantu meminimalisir hal tersebut.

Religiusitas merujuk pada keseluruhan aspek keagamaan yang mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku individu terhadap agama. Menurut Gazalba, istilah ini berasal dari kata Latin "religio," yang berarti mengikat, menunjukkan bahwa religiusitas melibatkan aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemeluk agama. Religiusitas melibatkan elemen kognitif (pengetahuan tentang agama) dan afektif (perasaan terhadap agama), serta bagaimana keduanya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari (Alwi, 2014). Secara keseluruhan, religiusitas bukan hanya sekadar kepatuhan pada ritual, tetapi juga mencerminkan kedalaman hubungan batin antara individu dengan Tuhan serta pengaruhnya terhadap perilaku sosial dan moral mereka. Religiusitas dapat

berfungsi sebagai pendorong bagi individu untuk melakukan *whistleblowing* dengan memberikan dorongan moral dan etika, sejalan dengan penelitian oleh Putri dan Zahroh (2022). Namun, ada penelitian yang menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing* seperti penelitian yang dilakukan oleh Zullaekha dan Nustini (2024).

Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak studi yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi niat *whistleblowing*. Penelitian yang dilakukan oleh Chandraini *et al.* (2023) menemukan bahwa perlindungan hukum memiliki pengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Tingkat keseriusan kecurangan terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing* (Alwi & Helmayunita, 2020); (Suhartini *et al.*, 2023). Namun, penelitian oleh Nurhalizah dan Saud (2021) mengungkapkan bahwa tingkat keseriusan kecurangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam pengaruh variabel-variabel terhadap niat *whistleblowing*. Niat untuk melakukan *whistleblowing* terbukti dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *personal cost of reporting* (Mike & Ajang, 2022). Saluran pelaporan anonim telah dibahas dalam penelitian dan terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing* (Salfitri & Coryanata, 2024). Namun demikian, tidak ada penelitian sebelumnya yang secara komprehensif menggabungkan semua variabel ini dalam satu penelitian, sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat *whistleblowing* secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengkaji kembali pengaruh variabel perlindungan hukum, *personal cost of reporting*, saluran pelaporan anonim, tingkat keseriusan kecurangan, dan religiusitas sebagai pemoderasi, terhadap niat *whistleblowing* pada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behaviour* (TPB).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum berpengaruh terhadap niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah *personal cost of reporting* berpengaruh terhadap niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*?
3. Apakah saluran pelaporan anonim berpengaruh terhadap niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*?
4. Apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*?
5. Apakah religiusitas mampu memoderasi hubungan *personal cost of reporting* terhadap niat *whistleblowing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh perlindungan hukum terhadap niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *personal cost of reporting* terhadap niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh saluran pelaporan anonim terhadap niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh tingkat keseriusan kecurangan terhadap niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*
5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan religiusitas dalam memoderasi hubungan *personal cost of reporting* terhadap niat *whistleblowing*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi niat *whistleblowing* pada pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perlindungan hukum, *personal cost of reporting*, saluran pelaporan anonim, tingkat keseriusan kecurangan, dan religiusitas sebagai pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi akademisi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat *whistleblowing*, khususnya dalam konteks pegawai pemerintah kota

Yogyakarta. Variabel yang dianalisis meliputi perlindungan hukum, *personal cost of reporting*, saluran pelaporan anonim, tingkat keseriusan kecurangan, dan religiusitas sebagai pemoderasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperkuat sistem *whistleblowing*, serta bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang serupa di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penelitian

Struktur penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan landasan teori, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka model penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan secara rinci metodologi penelitian yang akan diterapkan, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan Penelitian

Bab ini menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, serta mencakup pengujian dan analisis penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, serta saran untuk penelitian di masa depan atau untuk pengembangan dari hasil penelitian.

BAB II

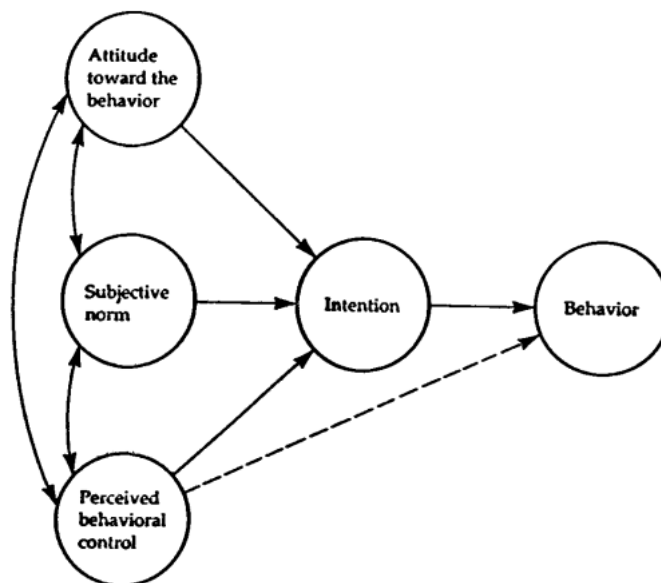
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikel yang berjudul “*From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behaviour*”, yang menggambarkan keterkaitan antara niat dan perilaku manusia dalam konteks pengambilan keputusan. TPB adalah hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* dan menambahkan dimensi kontrol perilaku yang dianggap sebagai faktor yang memengaruhi niat berperilaku (Ajzen, 1991). Dalam kerangka TPB, niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, di mana ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk membentuk niat individu dalam bertindak (Ajzen, 1991). Teori ini telah digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk Kesehatan, Pendidikan, dan perilaku konsumen, menunjukkan relevansinya dalam memahami kompleksitas perilaku manusia dan bagaimana faktor-faktor psikologis dapat memengaruhi keputusan individu (McEachan *et al.*, 2011).

Theory of Planned Behaviour menyediakan kerangka yang kokoh untuk memahami bagaimana berbagai faktor psikologis memengaruhi niat dan perilaku individu. Dalam hal ini, sikap terhadap perilaku mengacu pada penilaian seseorang, baik positif atau negatif, terhadap suatu tindakan, yang dipengaruhi oleh keyakinannya tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Selanjutnya, norma

subjektif menggambarkan pandangan individu mengenai apa yang diharapkan orang lain dan tekanan sosial yang mungkin dihadapi dalam melakukan suatu perilaku. Jika individu merasa bahwa orang-orang terdekatnya mendukung atau mengharapkan mereka untuk berperilaku sehat, maka norma subjektif ini dapat memperkuat niat mereka untuk mengikuti perilaku tersebut. Berikut merupakan gambar dari *Theory of Planned Behaviour Framework*.



Gambar 2.1 TPB Framework, Ajzen (1991)

Komponen ketiga, yakni kontrol perilaku yang dirasakan, berhubungan dengan sejauh mana individu percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan perilaku tertentu. Faktor ini mencakup pengalaman sebelumnya, ketersediaan sumber daya, serta potensi kendala. Dengan demikian, TPB tidak hanya menjelaskan proses pengambilan keputusan individu tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi antara sikap, norma subjektif, dan kontrol

perilaku yang diinginkan. Hal ini menjadikan TPB sebagai alat yang berguna dalam merancang intervensi dan program perubahan perilaku di berbagai bidang.

Dari penjelasan dari beberapa peneliti terdahulu, *Theory of Planned Behaviour* relevan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi niat melakukan *whistleblowing*.

2.2 Fraud

Fraud merupakan masalah yang kompleks dan masih menjadi tantangan signifikan di berbagai sektor, termasuk bisnis dan akademis. Definisi *fraud* biasanya difokuskan pada unsur-unsur pokok yang melibatkan manipulasi data, tindakan curang, dan pelanggaran etika dalam aktivitas bisnis maupun organisasi lainnya. *Fraud* menurut *Association of Certified Fraud Examiners*, adalah tindakan penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyadari bahwa kesalahan tersebut dapat menghasilkan beberapa keuntungan negatif bagi orang atau organisasi atau yang lain (ACFE, 2020). Definisi ini menambahkan dimensi organisasional pada konsep *fraud*, sehingga memperluas pemahaman kita tentang bagaimana *fraud* dapat terjadi di berbagai tingkatan dan bidang operasional sebuah perusahaan.

2.3 Niat Whistleblowing

Whistleblowing system adalah sistem yang biasanya diterapkan pada perusahaan atau organisasi lainnya untuk mencegah pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan. (Rahmi *et al.* 2024). Berkenaan dengan objek penelitian yang digunakan, pada Peraturan Walikota Kota Yogyakarta

Nomor 52 Tahun 2023 tentang *whistleblowing system* pada Pemerintah Kota Yogyakarta disebutkan bahwa *whistleblowing system* adalah sistem penanganan aduan yang menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang dibuat oleh *whistleblower* tentang tindak penyimpangan yang terjadi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Penyimpangan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain jika mereka melanggar hukum, standar, atau peraturan yang berlaku. Sistem pelaporan ini dirancang untuk mengendalikan kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. *Whistleblower* sangat penting untuk menjalankan sistem *whistleblowing* dan menemukan perilaku kecurangan yang terjadi pada bisnis (Wahyuningtiyas & Pramudyastuti, 2022). *Whistleblowing* muncul sebagai akibat dari meningkatnya kasus kecurangan, penyimpangan kecurangan, penyimpangan keuangan, dan penyimpangan dalam pengendalian internal. *Whistleblowing system* diharapkan dapat berfungsi dengan baik untuk mengurangi kasus kecurangan baik dalam bisnis maupun pemerintahan (Safkaur & Hertati, 2019).

2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat *Whistleblowing*

2.4.1 Perlindungan Hukum

Subyek hukum menerima perlindungan hukum yang diberikan dengan cara pencegahan dan represif, baik secara lisan maupun tulisan. Secara khusus, perlindungan hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian (Putri *et al.*, 2020). Seseorang yang melakukan pengungkapan disebut dengan istilah *whistleblower*. Safitri (2022) menyatakan bahwa *whistleblower*

memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap kecurangan. Adanya dukungan dari pihak eksternal, yaitu perlindungan hukum, adalah salah satu cara untuk meningkatkan minat seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. *Whistleblower* sering dikucilkan dan bahkan di teror oleh orang-orang yang tidak suka mereka. Abdullah dan Hasma (2018) menyatakan bahwa *whistleblower* seringkali dipandang sebagai pemberontak moral sehingga besar kemungkinan mereka akan dikucilkan atau bahkan hingga mendapatkan terror. Karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang baik bagi *whistleblower*. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I UUD 1945.

2.4.2 Saluran Pelaporan Anonim

Pelapor kecurangan tidak perlu khawatir melaporkan melalui saluran pelaporan anonim, karena mereka bisa melakukannya tanpa mengungkapkan identitas pribadi. Ini juga membantu mengurangi risiko akibat pengungkapan identitas yang dapat membahayakan pelapor jika diketahui banyak orang. Menjaga kerahasiaan pelapor dapat membuat mereka merasa lebih percaya diri dan lebih aman untuk mengungkap pelanggaran. Sarbanes Oxley, menyadari pentingnya memberikan rasa aman dan perlindungan untuk pelapor. Idenya adalah mendorong mereka untuk melaporkan informasi tanpa takut menghadapi pembalasan dari pelaku kecurangan. Hasil penelitian dari Salfitri dan Coryanata (2024) menegaskan bahwa keberadaan saluran pelaporan anonim berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*.

2.4.3 Tingkat Keseriusan Kecurangan

Besarnya konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari tindakan kecurangan yang dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial menentukan seberapa serius kecurangan tersebut (Liani & Helmayunita, 2024). Jika pemerintah atau organisasi menghadapi lebih banyak dampak atau risiko kecurangan, pegawai lebih cenderung untuk melaporkan kecurangan. Ini karena mereka ingin mencegah kecurangan sehingga tidak ada kerugian yang lebih besar jika kecurangan terus berlanjut dan dapat menyebabkan kebangkrutan (ACFE, 2020). *Whistleblowing* lebih mungkin terjadi ketika seorang pegawai mengetahui atau menyaksikan kecurangan, terutama ketika kecurangan itu sangat fatal. Setiap orang mungkin memiliki perbedaan tindakan atas bentuk reaksi terhadap kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, tingkat keseriusan kecurangan masuk dalam kategori persepsi kontrol terhadap perilaku (*perceived behavioral control*) dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) (Ajzen, 1991). Hal ini disebabkan karena individu yang menilai apakah suatu tindakan kecurangan itu serius atau tidak akan memperhitungkan potensi kerugian yang mungkin terjadi, sehingga persepsi ini berpengaruh terhadap keputusan mereka dalam mengambil langkah untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

2.4.4 Personal Cost of Reporting

Personal cost of reporting, menurut Schutlz *et al.* (1993), merupakan penilaian karyawan atau anggota organisasi terhadap kemungkinan pembalasan, balas dendam, atau sanksi dari anggota organisasi lain sebagai pihak yang dilaporkan sebagai akibat dari laporan kecurangan atau bukti kecurangan yang

terjadi di dalam organisasi tersebut. Pegawai yang mengetahui adanya tindak kecurangan mungkin menolak untuk mengungkapkannya karena takut akan dibalas dendam atas perbuatannya.

2.4.5 Religiusitas

Gazalba menyatakan bahwa istilah ini berasal dari kata Latin "religio", yang berarti "mengikat", yang menunjukkan bahwa religiusitas melibatkan aturan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mereka yang menganut agama tertentu. Religiusitas mengacu pada intensitas keyakinan agama, praktik, dan pentingnya agama dalam kehidupan individu (Papaleontiou, 2024). Frances Power Cobbe berpendapat bahwa moralitas bergantung pada agama. Religiusitas dan moral saling terkait erat, karena nilai-nilai moral sering berasal dari keyakinan agama.

Dalam Islam, misalnya, perilaku moral disebut sebagai al-akhlaq al karimah, mencerminkan manifestasi keyakinan tentang benar dan salah (Setiawan, 2024). Religiusitas secara signifikan memengaruhi perilaku seseorang di berbagai domain, seperti perilaku sosial, pengambilan keputusan etis, dan pilihan kehidupan pribadi. Semakin baik identitas moral seseorang, maka semakin baik pula perilaku moral yang ditunjukkan. Religiusitas berfungsi sebagai kerangka panduan bagi individu, membantu mereka membentuk sikap dan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama mereka. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa, menurut *Theory of Planned Behaviour*, sifat religius memengaruhi perilaku individu.

Faktor internal (seperti tekad, keterampilan, dan pengetahuan) serta faktor eksternal (seperti politik, budaya, dan agama) memengaruhi kemampuan individu untuk mengatur perilaku mereka. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) menunjukkan bahwa persepsi kontrol terhadap perilaku, termasuk pemahaman individu tentang peluang dan hambatan, berperan penting dalam menentukan sejauh mana mereka dapat mengendalikan tindakan mereka. Sikap dan norma pribadi juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi perilaku, terutama untuk perilaku yang dianggap penting oleh individu (Ajzen, 1991).

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
1	Hertati & Puspitawati (2023)	<ul style="list-style-type: none"> Perilaku Etika (PE) Moderasi: <i>Detection Fraud</i> (DF) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem <i>Whistleblowing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data hasil kuisioner Menggunakan 1.500 data responden orang karyawan PT Interbis Palembang Alat uji menggunakan SPSS TPB dan <i>Prosocial Behaviour Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> PE => DF (didukung) PK => PE (didukung) PE => DF (didukung)
2	Syahputra & Urumsah (2019)	<ul style="list-style-type: none"> Audit Forensik (AF) Audit Investigasi (AI) <p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gender (G) Pengalaman (P) 	<ul style="list-style-type: none"> Pendeteksian <i>Fraud</i> (PF) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data hasil kuisioner Menggunakan 92 data responden auditor Alat uji menggunakan Partial Least Square (PLS) <i>Agency Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> AF => PF (Didukung) AI => PF (Didukung) G*AF => PF (Didukung) P*AF => PF (Didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
3	Annisa & Nurlaeli (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi Etika Relativisme (OER) • Niattas Moral (IM) • Komitmen Organisasi (KO) • Identitas Profesional (IP) • Sosialisasi Antisipatif (SA) • <i>Locus of control</i> (LoC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensi <i>Whistleblowing</i> (IW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data hasil kuisioner • Menggunakan 204 data responden Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian X dengan kriteria telah bekerja lebih dari satu tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma III. • Alat uji menggunakan SPSS & Ms. Excel • TPB 	<ul style="list-style-type: none"> • OER => IW (Didukung) • IP => IW (Didukung) • SA => IW (Didukung) • IM => IW (Tidak Didukung) • KO => IW (Tidak Didukung) • LC => IW (Tidak Didukung)
4	Liani dan Helmayunita (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat <i>Machiavellian</i> (SM) • Komitmen Profesional (KP) • Tingkat Keseriusan Kecurangan (TKK) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Whistleblowing Intention</i> (WI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data hasil survei kuisioner • Menggunakan 138 data responden karyawan di BPKD, BAPPEDA, BKPSDM, DPMPTSP di Solok Selatan. • SPSS 25 tahun 2023 • TPB 	<ul style="list-style-type: none"> • SM=> WI (Tidak Didukung) • KP => WI (Didukung) • TK => WI (Didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
5	Mike & Ajang (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Magnitude of Consequences</i> (MoC) • <i>Social Consequences</i> (SC) • <i>Proximity</i> (PX) • <i>Fear of Retaliation</i> (FoR) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Whistleblowing Intention</i> (WI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data hasil kuisioner • Menggunakan 211 data responden mahasiswa akuntansi tahun akhir di berbagai lembaga pendidikan tinggi di negara bagian Plateau • Alat uji menggunakan SPSS & Ms. Excel • TPB 	<ul style="list-style-type: none"> • MC=> WI (Didukung) • SC => WI (Didukung) • PX => WI (Tidak Didukung) • FR => WI (Didukung)
6	Suhartini, et al. (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Professional Commitment</i> (PC) • <i>Machiavellian Attitude</i> (MA) <p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Locus of control</i> (LoC) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Whistleblowing Intention</i> (WI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data hasil kuisioner • Menggunakan 263 data responden mahasiswa akuntansi angkatan 2019 di empat perguruan tinggi negeri di Surabaya • Alat uji menggunakan WarpPLS 8 • TPB 	<ul style="list-style-type: none"> • PC=> WI (Didukung) • MA => WI (Didukung) • LoC*PC => WI (Tidak Didukung) • LoC*MA => WI (Tidak Didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
7	Ainun, <i>et al.</i> (2021)	<ul style="list-style-type: none"> Sikap Terhadap Perilaku (STP) Norma Subyektif (NS) Persepsi Kontrol Perilaku (PKP) Tingkat Keseriusan Kecurangan (TKK) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Whistleblowing Intention (WI)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data hasil kuisioner Menggunakan 180 data responden mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah etika bisnis Alat uji menggunakan SPSS TPB 	<ul style="list-style-type: none"> STP=> WI (Didukung) NS => WI (Tidak Disukung) PCP => WI (Didukung) TK => WI (Didukung)
8	Rahayu dan Astuti (2023)	<ul style="list-style-type: none"> Sikap Terhadap Perilaku (STP) Norma Subjektif (NS) Persepsi Kontrol Perilaku (PKP) Persepsi Keseriusan Kecurangan (PKK) Persepsi Ancaman Pembalasan (PAP) <p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rasionalisasi (R) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Whistleblowing Intention (WI)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data hasil kuisioner Menggunakan 271 data responden karyawan yang bekerja dibidang akuntansi di wilayah Jabodetabek Alat uji menggunakan SPSS TPB dan <i>Prosocial Behaviour Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> STP=> WI (Didukung) PA => WI (Tidak Didukung) NS => WI (Didukung) PKP => WI (Didukung) PKK => WI (Didukung) PAP => WI (Tidak Didukung) R*PKK => WI (Didukung) R*PAP => (tidak didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
9	Alwi dan Helmayunita (2020)	<ul style="list-style-type: none"> Sikap (S) <i>Personal cost of reporting</i> (PCR) Tingkat Keseriusan Kecurangan (TKK) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Whistleblowing Intention</i> (WI) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data hasil kuisioner Menggunakan 104 data responden yang merupakan pegawai yang bekerja pada bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Alat uji menggunakan SPSS versi 23 TPB 	<ul style="list-style-type: none"> S => WI (Tidak Didukung) PCR => WI (Didukung) TK => WI (Didukung)
10	Salfitri dan Coryanata (2024)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur Pelaporan Anonim (JPA) Niat atas Moral (IM) Kepercayaan Pada Pimpinan (KP) 	<ul style="list-style-type: none"> Niat Mahasiswa Melakukan <i>Whistleblowing</i> (WI) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data hasil kuisioner Menggunakan 182 data responden mahasiswa aktif dari berbagai program studi perguruan tinggi di Indonesia. Alat uji menggunakan SPSS versi 26 TPB 	<ul style="list-style-type: none"> JPA => WI (didukung) IM => WI (didukung) KP => WI (didukung) BE => WI (Tidak didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
11	Islami dan Kurniawati (2023)	<ul style="list-style-type: none"> Sikap atas perilaku Norma subjektif Persepsi dukungan organisasi Persepsi kontrol perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> Niat melakukan <i>whistleblowing</i> internal (WI) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data hasil kuisioner Menggunakan 44 data responden karyawan yang bekerja pada PT Penerbit Erlangga Solo dan PT Macananjaya Cemerlang Klaten Alat uji mennggunakan SPSS TPB 	<ul style="list-style-type: none"> NS => WI (didukung) PDO => WI (didukung) SAP => WI (Tidak didukung) PKP => WI (Tidak didukung) SM => WI (Tidak didukung)
12	Ali dan Rusmanto (2022)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Performance Experiency</i> (PE) <i>Effort Expectancy</i> (EE) <i>Social Influence</i> (SI) <i>Facilitating Conditions</i> (FC) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Behavioral Intention</i> (BI) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data hasil kuisioner Menggunakan 126 data responden auditor eksternal yang bekerja di KAP di DKI Jakarta Alat uji menggunakan SmartPLS v 3.9 Teori Agensi 	<ul style="list-style-type: none"> PE => BI (didukung) EE => BI (Tidak didukung) SI => BI (Tidak didukung) FC => BI (Tidak didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
13	Oktaviani, <i>et al.</i> (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Aparatur (KA) • <i>Whistleblowing system</i> (WS) • Kesadaran anti-<i>fraud</i> (KAF) • <i>Ethical Climate</i> (EC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan Kecurangan (PK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data kuisisioner • Menggunakan 76 data responden auditor di perwakilan BPKP Provinsi Riau • Alat uji menggunakan SPSS • TPB, <i>Fraud Triangle Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • KA => PK (didukung) • WS => PK (didukung) • KAF => PK (didukung) • EC => PK (didukung)
14	Putri, <i>et al.</i> (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian <i>Reward</i> (PR) • Kolektivisme (KV) • Komitmen Organisasi (KO) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Whistleblowing Intention</i> (WI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data responden • Menggunakan 100 data responden pegawai TVRI Jawa Timur di Surabaya • Alat uji menggunakan SPSS • TPB 	<ul style="list-style-type: none"> • PR => WS (Tidak didukung) • KV => WS (didukung) • KO => WS (didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
15	Hastuti, et al. (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Personality</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Perception of reporting cost</i> - <i>Locus of control</i> - <i>Organizational commitment</i> • <i>Organization environmental:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Internal control perception</i> - <i>Organization climate</i> - <i>Organizational support</i> • <i>Fraud characteristics:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Status of violation</i> - <i>Seriousness off violation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Whistleblower Intention (WI)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data kuisisioner • Menggunakan 100 data responden dosen dari 14 universitas di Semarang. • Alat uji menggunakan SPSS • TPB 	<ul style="list-style-type: none"> • OCL => WI (didukung) • SoV => WI (didukung) • OC => WI (tidak didukung) • PoRC => WI (didukung) • LoC => WI (tidak didukung) • OS => WI (tidak didukung) • IC => WI (tidak didukung) • SToV => WI (tidak didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
16	Chandraini, <i>et al.</i> (2023)	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen Organisasi (KO) Keseriusan kecurangan (KK) Niat atas Moral (IM) Komitmen Profesi (KP) <i>Personal cost of reporting</i> (PC) <i>Locus of control</i> (LoC) <i>Reward</i> (RW) <p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Hukum (PH) 	<ul style="list-style-type: none"> Intensi <i>Whistleblowing</i> (IW) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif dengan data kuisioner Menggunakan 74 data responden auditor KAP di Palembang dan Bandar Lampung. Alat uji menggunakan PLS ver 3.0 TPB 	<ul style="list-style-type: none"> KO => IW (didukung) IM => IW (didukung) PC => IW (didukung) LoC => IW (didukung) RW => IW (didukung) KK => IW (tidak didukung) KP => IW (didukung) PH*PC => IW (didukung) PH*KO => IW (tidak didukung) PH*IM => IW (didukung) PH*PC => IW (didukung) PH*RW => IW (didukung) PH*KP => IW (tidak didukung) PH*KK => IW (tidak didukung)

2.6 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal yang akan di uji dan dibuktikan melalui proses penelitian. Pada penelitian ini, focus peneliti adalah menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* pada instansi Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.6.1 Pengaruh Perlindungan Hukum Terhadap Niat *Whistleblowing*

Niat untuk melakukan *whistleblowing* dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap *whistleblower*. Perlindungan hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena adanya kebijakan yang jelas dan efektif dapat meningkatkan rasa aman bagi individu untuk melapor tanpa takut akan pembalasan. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan hukum dapat menghalangi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*, sehingga organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi pelapor dari konsekuensi negatif. Penerapan sistem perlindungan dapat meningkatkan keberanian individu atau kelompok dalam mengungkapkan fakta (Yutrisia, 2017). Hubungan antara keduanya terlihat jelas dalam bagaimana kebijakan perlindungan sikap individu terhadap pelaporan kecurangan.

Kebijakan yang kuat dan transparan tidak hanya meningkatkan kepercayaan individu untuk melapor tetapi juga mendorong budaya organisasi yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Efendi dan Nuraini (2019) bahwa *whistleblower* sangat penting untuk mengungkapkan

kasus kecurangan dan korupsi di Indonesia, dan tingginya perlindungan hukum akan mendorong keberanian individu untuk melakukannya. Dengan demikian diajukan hipotesis:

H1: Perlindungan Hukum Berpengaruh Positif Terhadap Niat *Whistleblowing*

2.6.2 Pengaruh Saluran Pelaporan Anonim Terhadap Niat *Whistleblowing*

Adanya saluran pelaporan anonim adalah salah satu cara organisasi dapat mengurangi jumlah kasus kecurangan. Saluran ini membantu menyembunyikan identitas pribadi *whistleblower* yang hendak melaporkan kecurangan. Untuk memastikan bahwa *whistleblower* aman dan nyaman dari ancaman pihak lain, pihak yang bersangkutan harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Ini dimaksudkan untuk mengurangi konsekuensi bagi *whistleblower* yang melaporkan penipuan melalui saluran pelaporan yang tidak anonim. Dengan platform pelaporan anonim, seseorang tidak perlu takut menyebarkan identitas pribadi mereka ke publik, yang dapat menimbulkan ancaman bagi seorang pelapor.

Penelitian tentang saluran pelaporan anonim telah dilakukan oleh Salfitri dan Coryanata (2024) yang menemukan bahwa adanya mekanisme jalur pelaporan anonim akan meningkatkan keinginan individu untuk melaporkan kecurangan. Penemuan ini juga sejalan dengan penelitian lain yakni (Harahap *et al.*, 2020), yang menemukan bahwa minat orang untuk melaporkan melalui jalur pelaporan anonim akan lebih besar. Jika identitas seseorang dirahasiakan, mereka akan lebih merasa aman dan dilindungi saat melaporkan *fraud*. Dengan demikian diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Saluran Pelaporan Anonim Berpengaruh Positif Terhadap Niat *Whistleblowing*

2.6.3 Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat

Whistleblowing

Seberapa serius pelanggaran yang dapat merugikan suatu organisasi ditentukan oleh tingkat keseriusan kecurangan. Setiap anggota organisasi dapat memiliki persepsi yang berbeda terkait tingkat kecurangan. Tingkat keseriusan kecurangan terkait dengan seberapa besar nilainya dan jenis kecurangan yang terjadi. Penelitian yang membahas tentang tingkat keseriusan kecurangan telah dilakukan oleh Liani dan Helmayunita (2024) yang menyatakan bahwa tingkat keseriusan suatu kecurangan terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat individu untuk melakukan *whistleblowing*. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Ainun *et al.*, 2021), yang menunjukkan bahwa semakin serius bentuk kecurangan, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk melaporkannya.

Semakin tinggi tingkat keseriusan kecurangan, maka semakin tinggi pula niat untuk melakukan *whistleblowing* akan semakin tinggi juga. Sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* yang menjelaskan bahwa sikap individu terbentuk ketika seseorang melihat tanggung jawabnya terhadap lingkungan organisasinya, mereka mulai merasa bertanggung jawab untuk melaporkannya karena mereka melihat kerugian yang akan berdampak kepada banyak orang. Dengan demikian diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tingkat Keseriusan Kecurangan Berpengaruh Positif terhadap Niat *Whistleblowing*.

2.6.4 Pengaruh Personal Cost of Reporting Terhadap Niat Whistleblowing

Personal cost of reporting adalah unsur sikap terhadap perilaku (*attitude towards behaviour*) dari *Theory of Planned Behaviour*. sikap terhadap perilaku (*attitude towards behaviour*) bisa diartikan sebagai *personal cost of reporting*, atau biaya pribadi, merujuk pada persepsi individu mengenai risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin mereka hadapi ketika melaporkan pelanggaran atau kecurangan di tempat kerja. Semakin tinggi persepsi seseorang terhadap *personal cost of reporting*, maka akan semakin rendah keinginan mereka untuk melakukan *whistleblowing* (Busra *et al.*, 2019). Sejalan dengan penelitian oleh Mustopa *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel *personal cost of reporting* terhadap *whistleblowing intention*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan dukungan dari beberapa penelitian terdahulu, faktor *personal cost of reporting* relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menguji faktor-faktor yang memepengaruhi niat *whistleblowing*. Oleh karena itu, hipotesis ke-2 yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: *Personal cost of reporting* Berpengaruh Negatif Terhadap Niat *Whistleblowing*

2.6.5 Religiusitas Memoderasi Hubungan *Personal Cost of Reporting* dengan Niat *Whistleblowing*

Religiusitas seseorang dapat memengaruhi komitmen mereka melalui ajaran agama dan moral mereka. Orang-orang yang beragama kuat dididik untuk setia, bertanggung jawab, dan biasanya mengadopsi nilai-nilai tertentu yang

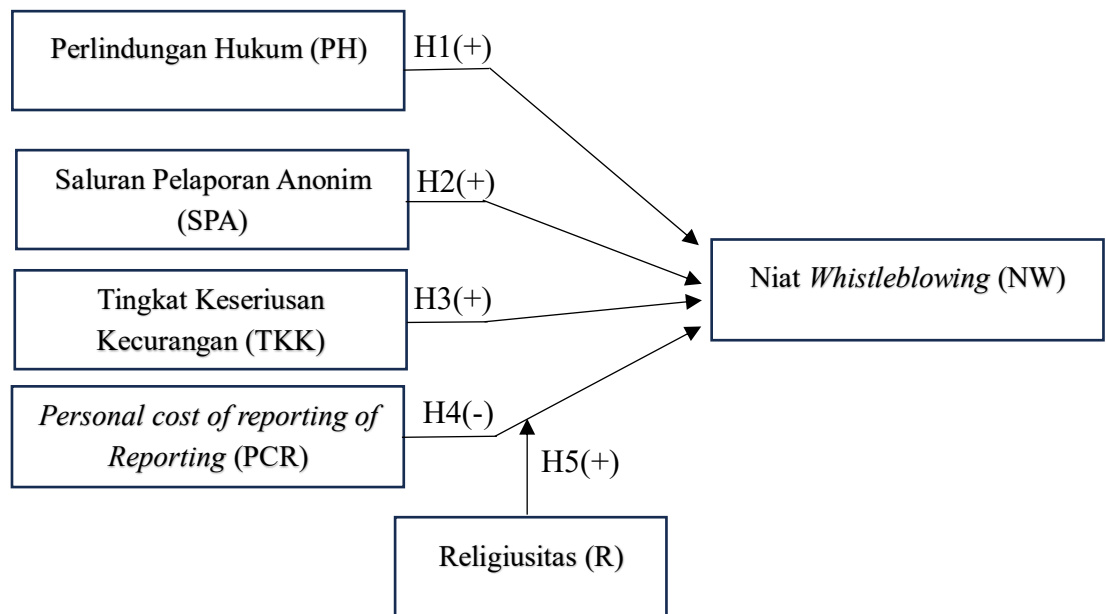
membuat mereka berkomitmen pada pekerjaan mereka.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip religius dan pekerjaan mereka, individu menjalankan tugasnya sesuai dengan informasi yang dia terima tanpa menambah atau mengurangi informasi tersebut, sehingga data yang diolah menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hal ini mendorong seorang individu untuk mematuhi perintah yang dibenarkan agama dan menghindari perintah yang dilarang. Ini juga akan meningkatkan keinginan untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam konteks lingkungan profesional mereka (Kashif *et al.*, 2017).

Studi Ayem dan Rumdoni (2021); Putri dan Zahroh (2022) dan Widyadhana dan Puspita (2021) menemukan bahwa ada pengaruh religiusitas terhadap niat *whistleblowing*. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Zullaekha dan Nustini (2021) tidak menemukan hubungan antara religiusitas dan niat *whistleblowing*. Sejalan dengan penelitian oleh Rahmawati (2022) yang menemukan bahwa variabel religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel personal biaya dengan niat *whistleblowing*. Dengan demikian diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Religiusitas memoderasi hubungan *personal cost of reporting* dengan Niat *Whistleblowing*

2.7 Model Penelitian



Gambar 2.2 Model Penelitian

Model penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* (NW), yaitu melaporkan tindakan tidak etis dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi perlindungan hukum (PH) yang diprediksi berhubungan positif, saluran pelaporan anonim (SPA) yang berhubungan positif, tingkat keseriusan kecurangan (TKK) yang juga berhubungan positif terhadap niat *whistleblowing*, dan *personal cost of reporting* (PCR) yang berhubungan negatif. Selain itu, religiusitas (R) berperan sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari faktor *personal cost of reporting* (PCR) terhadap niat *whistleblowing*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui kuisisioner responden. Pendekatan kuantitatif sering dianggap sebagai metode objektif karena hasilnya dapat dijelaskan secara pasti menggunakan angka-angka statistik. Temuan dalam penelitian kuantitatif sangat bergantung pada populasi dan sampel yang dijadikan data penelitian (Darwin *et al.*, 2021). Berikutnya, akan diuraikan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian mengacu pada kelompok individu yang sedang diselidiki, memainkan peran penting dalam desain penelitian, pengumpulan partisipan, pengumpulan data, dan analisis (Willie, 2023). Penelitian ini akan menggunakan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta sebagai populasi. Sampel merupakan bagian daripada populasi. Sampel yang baik didefinisikan sebagai sampel yang memiliki karakteristik penting secara lengkap dan serupa dengan populasi, serta merupakan representasi yang baik dari populasi (Uakarn *et al.*, 2021).

Ukuran sampel harus dihitung terlebih dahulu untuk bisa mewakili populasi yang ada. Menurut Hair *et al.* (2018), ketika jumlah populasi tidak

diketahui secara pasti, ukuran sampel dihitung dengan mengalikan jumlah indikator dikalikan dengan skala 5-10. Dalam penelitian ini, 27 indikator dikalikan dengan 5, menghasilkan minimal 135 responden.

Penelitian ini akan menggunakan metode *Non-Probability Sampling* dengan Teknik *Purposive Sampling* sebagai metode untuk mendapatkan sampel. *Non-Probability Sampling* dalam studi kuantitatif digunakan untuk menggeneralisasi temuan dan memaksimalkan tingkat respons (Asiamah *et al.*, 2022). Dalam kasus di mana elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih, metode pengambilan sampel yang dikenal sebagai *Non-Probability Sampling* digunakan. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti kemudahan akses atau keahlian peneliti, bukan melalui proses acak. Contoh metode ini meliputi *purposive sampling*, *convenience sampling*, dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* pada penelitian kuantitatif melibatkan pendefinisian karakteristik untuk tujuan yang relevan dengan penelitian, memastikan validitas internal dan eksternal (Andrade, 2020).

Menurut Robinson (2014) yang juga dibahas pada penelitian oleh Campbell *et al* (2020), teknik *purposive sampling* ini digunakan karena dianggap bahwa berbagai jenis orang mungkin memiliki pandangan berbeda dan penting terhadap masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, mereka perlu dimasukkan dalam sampel untuk memastikan penelitian mencakup sudut pandang yang beragam sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Berikut merupakan kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah:

1. Responden telah bekerja selama minimal 1 tahun sebagai Pegawai OPD Kota Yogyakarta.
2. Responden berstatus sebagai pegawai tetap pada OPD Kota Yogyakarta.
3. Pendapat responden tentang pengaduan kecurangan melalui *whistleblowing system* dan seberapa baik sistem pengendalian internal organisasi berfungsi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer melalui metode survei. Responden akan menerima kuesioner yang berisi beberapa pernyataan dan pertanyaan dari indikator penelitian. Penelitian survei adalah metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman dan perspektif individu pada sampel populasi besar untuk membantu dalam proses pengambilan Keputusan (Alderman *et al.*, 2010).

Kuisisioner dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan skala likert 1-6 dengan penjelasan (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Agak Tidak Setuju, (4) Agak Setuju, (5) Setuju, dan (6) Sangat Setuju.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Proses memberikan penjelasan menyeluruh terkait suatu variabel penelitian, seperti cara pengukuran, observasi, atau pengamatan, dikenal sebagai definisi operasional (Urumsah & Lasmono, 2022). Definisi operasional ini berfungsi untuk menjelaskan secara spesifik bagaimana konsep atau variabel diukur atau diidentifikasi dalam penelitian, guna menghindari ambiguitas serta memastikan keseragaman pemahaman.

Variabel dependen dari penelitian ini adalah niat *whistleblowing*, sementara variabel independen pada penelitian ini terdiri dari perlindungan hukum, *personal cost of reporting*, saluran pelaporan anonim, dan tingkat keseriusan kecurangan, dengan religiusitas sebagai pemoderasi. Pengukuran masing-masing variabel dilakukan menggunakan beberapa indikator yang diadaptasi dari studi terdahulu, dan data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner.

3.4.1 Perlindungan Hukum

Menurut WPA 1989, yang dikutip dari penelitian oleh Wijaya dan Firman (2020), pengungkapan informasi oleh seorang pegawai sebagai *whistleblower* harus dijaga kerahasiaannya jika ada keyakinan kuat bahwa informasi tersebut mengungkap pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau bahaya serius terhadap kesehatan atau keselamatan publik. Pengungkapan semacam itu dilindungi oleh hukum dan tidak dianggap melanggar, bahkan kerahasiaannya wajib dijamin jika diperlukan sesuai perintah eksekutif.

Tabel 3.1 Indikator Perlindungan Hukum

Pertanyaan	Referensi
Saya melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) karena adanya perlindungan hukum pelapor sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.	Tatawi (2015)
Saya terdorong untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) ketika saya merasa aman dari ancaman terhadap diri sendiri, keluarga, dan harta benda.	
Jika saya mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum yang adil, saya akan berani melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).	
Perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, akan mendorong saya untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).	
Adanya kepastian hukum bagi pelapor membuat saya berani untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).	

3.4.2 Saluran Pelaporan Anonim

Karena memberikan rasa aman kepada pelapor, saluran pelaporan anonim sangat terkait dengan keinginan untuk melakukan *whistleblowing*. Ketika orang percaya bahwa identitas mereka dilindungi, mereka dapat mengurangi kemungkinan akibat buruk seperti pembalasan, stigma, atau tekanan sosial. Hal ini membuat mereka merasa lebih nyaman dan berani melaporkan pelanggaran. Anonimitas juga memungkinkan individu untuk lebih fokus pada nilai moral dari pelaporan karena mengurangi hambatan psikologis seperti ketakutan atau konflik loyalitas. Oleh karena itu, saluran anonim untuk melaporkan dapat sangat membantu mendorong *whistleblowing*, terutama di tempat kerja di mana budaya kerja belum sepenuhnya transparan.

Tabel 3.2 Indikator Saluran Pelaporan Anonim

Pertanyaan	Sumber
Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) dengan identitas yang disamarkan.	Indriani <i>et al.</i> (2019)
Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang terjadi tanpa mengungkapkan informasi pribadi saya.	
Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) jika identitas saya dijaga kerahasiaannya oleh pihak instansi.	
Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang ada, melalui saluran yang dapat dipercaya.	

3.4.3 Tingkat Keseriusan Kecurangan

Whistleblowing sering kali dipengaruhi oleh seberapa serius kecurangan, yaitu seberapa besar dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Kecurangan yang serius biasanya melibatkan konsekuensi yang signifikan, seperti kerugian finansial yang signifikan, ancaman terhadap keselamatan publik, pelanggaran hukum yang berat, atau kerusakan reputasi organisasi secara keseluruhan. Ketika orang menyadari dampak besar dari kecurangan, mereka lebih

cenderung untuk melakukan *whistleblowing*. Selain itu, tingkat keseriusan ini dapat menyebabkan rasa urgensi dan alasan yang lebih kuat bagi individu untuk bertindak, bahkan jika risiko bagi mereka, seperti stigma sosial atau pembalasan, relatif besar.

Tabel 3.3 Indikator Tingkat Keseriusan Kecurangan

Pertanyaan	Referensi
Setiap tingkatan kecurangan yang terjadi dapat membawa dampak buruk bagi organisasi.	Schultz <i>et al.</i> , (1993)
Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang dilakukan oleh rekan kerja saya meskipun jumlahnya kecil.	
Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran untuk memperoleh keuntungan pribadi mereka.	
Seberapa serius pelanggaran tersebut, baik besar maupun kecil, akan memengaruhi keputusan saya untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) tersebut.	

3.4.4 Personal cost of reporting

Personal cost of reporting merupakan persepsi pegawai tentang adanya pembalasan atau balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi jika pegawai mengungkapkan suatu kecurangan (Triafani, 2024). Hal ini sama seperti yang dijelaskan dalam *National Business Ethics Survey* (2007), bahwa pegawai sering merasa takut menghadapi sanksi dari organisasi, atasan, atau rekan kerja.

Tabel 3.4 Indikator *Personal cost of reporting*

Pertanyaan	Referensi
Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) di lingkungan instansi tempat saya bekerja meskipun akan mendapat retaliasi (pembalasan).	Schutlz <i>et al.</i> (1993)
Terlepas dari berbagai bentuk retaliasi (pembalasan) yang mungkin terjadi, saya tetap bersedia untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).	
Saya percaya melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) lebih banyak membawa manfaat bagi organisasi.	

Tabel 3.5 Lanjutan

Pertanyaan	Referensi
Saya siap berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).	Schutlz <i>et al.</i> (1993)
Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) di lingkungan instansi tempat saya bekerja meskipun akan mendapat retaliasi (pembalasan).	

3.4.5 Religiusitas

Individu yang memiliki keyakinan agama yang kuat sering kali merasa terdorong oleh kewajiban moral untuk melaporkan perilaku tidak etis, karena tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai moral yang dianut dalam kepercayaan mereka (Yudira & Helmy, 2024).

Tabel 3.5 Indikator Religiusitas

Pertanyaan	Referensi
Saya secara rutin mencari dan membaca berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan ajaran agama saya.	Worthington <i>et al.</i> , (2003)
Keyakinan agama saya memiliki pengaruh besar terhadap setiap aspek kehidupan saya.	
Penting bagi saya untuk mendalami dan mengamalkan kepercayaan yang saya yakini dalam kehidupan.	
Saya terlibat aktif dan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan kelompok agama di lingkungan sekitar saya.	

3.4.6 Niat Whistleblowing

Seseorang melakukan tindakan *whistleblowing* dengan niat untuk mengungkapkan kecurangan karena terdapat kecurangan yang serius dan mereka takut akan akibatnya. Untuk mengukur variabel dependen niat tindakan *whistleblowing* dalam penelitian ini, kuisioner yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya digunakan (Efendi & Nuraini, 2019).

Tabel 3.III6 Indikator Niat *Whistleblowing*

Pertanyaan	Referensi
Mengetahui adanya pelanggaran di instansi saya mendorong saya untuk segera melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) tersebut.	Efendi dan Nuraini (2019)
Adanya dampak kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran di instansi saya, menumbuhkan niat saya untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) tersebut.	
Saya percaya dengan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) akan menciptakan keadaan yang lebih baik kedepannya.	
Jika mengetahui adanya pelanggaran di instansi saya, saya akan berusaha melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) melalui jalur resmi internal, seperti kepada atasan atau unit kepatuhan.	
Jika saluran internal tidak memungkinkan, saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) melalui jalur eksternal, seperti lembaga penegak hukum atau media.	

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Metode Structural Equation Model (SEM)

Model Struktural (SEM) adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel laten dan indikatornya (Wibisono *et al.*, 2015). Dalam praktiknya, ada dua metode yang mendominasi SEM, yaitu SEM *Covariance-Based* (CB-SEM) dan SEM *Partial Least Square* (PLS-SEM). Pemodelan Persamaan Struktural (SEM), juga dikenal sebagai analisis persamaan struktur kovarian, analisis variabel laten, dan analisis faktor konfirmasi dan analisis hubungan struktural linier (Lisrel) (Sayyida & Anekawati, 2018). Berdasarkan nama-nama tersebut, SEM dapat dijelaskan sebagai metode analisis yang menggabungkan pendekatan analisis faktor (*factor analysis*), model struktural (*structural model*), dan analisis jalur (*path analysis*) (Febryaningrum, *et al.*, 2024).

Penelitian ini akan menggunakan metode PLS-SEM. PLS-SEM memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan secara bersamaan dalam model kompleks yang terdiri dari banyak konstruksi, variabel indikator, dan jalur struktural. Untuk memperkirakan model jalur dengan variabel laten dan hubungannya, PLS-SEM telah menjadi teknik yang populer (Rahadi, 2023). Beberapa keuntungan PLS-SEM termasuk memodelkan banyak variabel dengan tingkat signifikansi yang lebih tinggi; menangani masalah multikolinieritas pada dataset yang besar; kuat dalam menangani masukan hilang dan tidak lengkap; dan memajukan penyebab laten dengan lebih maju berdasarkan muatan salib yang terkait dengan penyebab respons, menghasilkan hipotesis yang lebih kuat (Rahadi, 2023). Perangkat lunak yang akan digunakan untuk meneliti menggunakan metode PLS-SEM pada penelitian ini adalah *SmartPLS 4.0*.

3.5.2 Model Pengukuran

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang berfungsi untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu alat ukur. Alat ukur yang dimaksud adalah indikator-indikator atau pertanyaan yang ada di dalam kuisioner penelitian. Kuisioner bisa dikatakan valid jika pertanyaan yang tercantum bisa menggali informasi yang hendak diukur oleh (Janna, 2021). Uji validitas menjadi Langkah awal yang penting dalam memastikan kualitas instrument sebelum berlanjut ke tahapan uji realibilitas, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Notoatmodjo (2005) dalam Widi R (2011), reliabilitas merujuk pada ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Uji reliabilitas digunakan untuk memeriksa konsistensi alat ukur, yakni apakah alat tersebut memberikan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berulang kali. Alat ukur dianggap reliabel jika menghasilkan hasil yang konstan dalam pengukuran berulang kali. Untuk setiap variabel dalam penelitian ini, setiap instrument dalam suatu variabel dianalisis menggunakan koefisien gabungan reliabilitas dan Cronbach's *alpha*. Instrumen tersebut dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien gabungan reliabilitas melebihi 0,7 dan cronbach's *alpha* lebih dari 0,6 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian reliabilitas ini menjadi langkah yang penting sebelum melanjutkan ke tahap analisis data lainnya.

3.5.3 Model Struktural (*Inner Model*)

Ada tiga jenis model dalam analisis jalur SEM-PLS; *inner model*, *outer model*, dan *weight relation*. *Inner model* menunjukkan hubungan antar variabel laten, *outer model* menunjukkan hubungan antara variabel laten dengan variabel indikatornya, sedangkan *weight relation* menunjukkan perkiraan nilai variabel laten. Model struktural atau inner model menggambarkan model hubungan antar variabel laten yang disusun berdasarkan dasar teori. PLS dirancang untuk model rekursif, sehingga terdapat hubungan antar variabel laten yang membentuk sistem sebab akibat (Ardi & Isnayanti, 2020). Penelitian ini akan melakukan beberapa pengujian terhadap model struktural sebagai berikut.

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melakukan pengujian model structural, dimulai dengan melihat R square untuk setiap variabel dependen yang diberikan PLS (Chin, 1998). Koefisien determinasi memiliki peran penting untuk mengetahui cara variabel independen berfungsi untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, dan berdasarkan nilai-nilai ini, secara teoritis, nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi menunjukkan model regresi yang lebih baik (Priyono, 2023).

3.5.3.2 PLS Predict

Salah satu isu penting saat menerapkan PLS-SEM adalah mengevaluasi kekuatan prediksi (Hair *et al.*, 2021). Untuk mengatasi isu ini, Shmueli, *et al.* (2016) memperkenalkan metode terbaru untuk mengevaluasi prediksi kekuatan sebuah model, yakni PLS *predict*. PLS *predict* adalah alat baru yang memungkinkan penilaian kekuatan prediksi di luar sampel suatu model.

3.5.3.3 Uji Goodness of Fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) adalah uji hipotesis yang bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan dan apakah model secara keseluruhan sesuai dan tepat dalam menggambarkan data, yang berfungsi sebagai validasi dalam PLS-SEM. Tenenhaus membuat index ini untuk menilai model pengukuran dan struktural serta untuk memprediksi keseluruhan model dengan menyediakan pengukuran yang sederhana. Uji Gof digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model sesuai atau cocok dengan data penelitian yang tersedia. Nilai GoF berkisar antara 0 dan 1. Mengacu pada pedoman evaluasi model yang dikemukakan oleh Chin (1998),

mengkategorikan interpretasi nilai GoF ke dalam tiga tingkatan, yaitu: GoF sebesar 0,10 menunjukkan tingkat kelayakan model yang rendah, GoF sebesar 0,25 menunjukkan tingkat kelayakan model yang moderat, dan GoF sebesar 0,36 atau lebih dianggap mencerminkan model dengan kelayakan yang tinggi. Untuk memperoleh nilai GoF ini, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{AVE} \times R^2}$$

Keterangan:

AVE = *average variance extracted*

R² = nilai rata-rata *R-square*

3.5.3.4 Uji T-Statistik

Uji t pertama kali diperkenalkan oleh William Seely Gosset pada tahun 1915. Uji ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua populasi. Uji-t satu sampel, juga dikenal sebagai uji-t dua sampel, dibagi menjadi dua jenis uji-t berdasarkan jumlah sampel yang diuji. Uji-t satu sampel, juga dikenal sebagai uji-t satu sampel, menggunakan mekanisme kerja untuk membandingkan rata-rata variabel tunggal dengan nilai konstanta tertentu (Mustafidah *et al.*, 2020).

3.5.3.5 Path Coefficient

Metode koefisien jalur disarankan beberapa tahun yang lalu (Wright, 1921), sebagai cara yang fleksibel untuk menghubungkan koefisien korelasi antara variabel dalam sistem jamak dengan hubungan fungsional di antara variabel tersebut. Metode ini telah diterapkan dalam berbagai kasus (Wright, 1934). *Path coefficient* memiliki rentang antara -1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat, sementara nilai yang mendekati

-1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Jika nilainya mendekati 0, berarti hubungan langsung antara variabel-variabel tersebut lemah atau tidak signifikan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 PL Test

4.1.1 Uji Validitas Pilot Test

Dalam proses pengujian validitas, peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan dalam kuesioner telah dimengerti dengan baik oleh responden yang menjadi target penelitian, sehingga kuesioner tersebut layak digunakan dalam penelitian utama. Suatu indikator dalam kuesioner dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor di atas 0,70. Selain itu, validitas konvergen juga diperiksa dengan melihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*), di mana nilai minimum yang disyaratkan adalah sebesar 0,50 atau lebih tinggi.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Uji Validitas Responden Tahap awal

No.	Variabel	Kode	<i>Outer Loading</i>	AVE
1.	Perlindungan Hukum (PH)	PH1	0.959	0.840
		PH2	0.839	
		PH3	0.956	
		PH4	0.883	
		PH5	0.938	
2.	Saluran Pelaporan Anonim (SPA)	SPA1	0.820	0.722
		SPA2	0.945	
		SPA3	0.890	
		SPA4	0.727	

Tabel 4.1 Lanjutan

No.	Variabel	Kode	<i>Outer Loading</i>	AVE
3.	Tingkat Keseriusan Kecurangan (TKK)	TKK1	0.904	0.789
		TKK2	0.851	
		TKK3	0.871	
		TKK4	0.925	
4.	<i>Personal cost of reporting</i> (PCR)	PCR1	0.815	0.670
		PCR2	0.742	
		PCR3	0.972	
		PCR4	0.830	
		PCR5	0.709	
5.	Religiusitas (R)	R1	0.815	0.744
		R2	0.742	
		R3	0.972	
		R4	0.830	
6.	Niat <i>Whistleblowing</i> (NW)	NW1	0.930	0.855
		NW2	0.933	
		NW3	0.938	
		NW4	0.887	
		NW5	0.934	
		TKK2	0.885	
		TKK3	0.866	
		TKK4	0.838	

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *outer loading* setiap indikator yang melebihi 0.7 serta nilai AVE untuk masing-masing variabel yang lebih besar dari 0.5.

4.1.2 Uji Reliabilitas Pilot Test

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu Niat *Whistleblowing*, Perlindungan Hukum, *Personal cost of reporting*, Saluran Pelaporan Anonim, Tingkat Keseriusan Kecurangan, dan Religiusitas. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Pilot Test

No.	Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
1.	Perlindungan Hukum (PH)	1.037	0.850
2.	Saluran Pelaporan Anonim (SPA)	1.513	0.903
3.	Tingkat Keseriusan Kecurangan (TKK)	0.993	0.914
4.	<i>Personal cost of reporting</i> (PCR)	0.850	0.925
5.	Religiusitas (R)	1.329	0.903
6.	Niat <i>Whistleblowing</i> (NW)	0.970	0.958

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan seperti tabel di atas, nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.70. dengan demikian, penelitian dilanjutkan ke survei besar karena instrumen yang digunakan telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga dianggap mampu mengukur konstruk secara konsisten dan layak untuk digunakan dalam pengumpulan data pada responden dalam skala yang lebih luas.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan data yang diperoleh melalui distribusi kuisisioner dalam format cetak. Penelitian ini akan menggunakan metode *Non-Probability Sampling* dengan Teknik *Purposive Sampling* sebagai metode untuk mendapatkan sampel. Kuisisioner di distribusikan dengan mendatangi beberapa staf OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meminta partisipasi mereka dalam mengisi kuisisioner secara langsung. Rekapitulasi hasil penyebaran kuisisioner dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Hasil Penyebaran Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar secara langsung	164	100%
Kuisisioner yang disebar secara langsung tapi tidak kembali	11	6.71%
Kuisisioner yang tidak memenuhi syarat	0	0%
Kuisisioner yang dapat diolah lebih lanjut	153	93.29%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 4.3 menunjukkan hasil penyebaran kuisisioner dalam penelitian ini. Total kuisisioner yang disebar secara langsung berjumlah 164 eksemplar, yang merupakan 100% dari keseluruhan distribusi. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 kuisisioner (6.71%) yang tidak dikembalikan oleh responden. Dengan demikian, jumlah kuisisioner yang layak dan dapat diolah lebih lanjut adalah sebanyak 153 eksemplar, atau sebesar 93.29% dari total kuisisioner yang disebar.

4.3 Hasil Data Responden

4.3.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 kategori gender, yaitu pria dan wanita. Hasil data responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Presentase
Pria	66	43.2%
Wanita	87	56.8%
Total	153	100%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh wanita sebanyak 87 orang (56.8%). Responden Pria sebanyak 66 orang (43.2%).

4.3.2 Berdasarkan Usia

Berdasarkan 153 responden pada penelitian ini, dikategorikan menjadi 5 kategori usia, yang dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Klasifikasi Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah	Presentase
< 20 tahun	0	0%
20-29 tahun	36	23.53%
30-39 tahun	57	37.25%
40-49 tahun	35	22.88%
>49 tahun	25	16.34%
Total	153	100%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel di atas menyajikan klasifikasi responden berdasarkan rentang usia. Dari total 153 responden, kelompok usia 30–39 tahun merupakan yang paling dominan dengan jumlah 57 orang atau 37.25% dari total responden. Disusul oleh kelompok usia 20–29 tahun sebanyak 36 orang (23.53%), kemudian kelompok usia 40–49 tahun sebanyak 35 orang (22.88%), dan kelompok usia di atas 49 tahun sebanyak 25 orang (16.34%).

4.3.3 Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan 153 responden pada penelitian ini, dikategorikan menjadi 5 kategori, yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan

Keterangan	Jumlah	Presentase
D3	45	27.11%
S1	76	45.78%
S2	12	7.23%
S3	0	0%
Lainnya	20	12.05%
Total	153	100%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel di atas menggambarkan klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Dari total 153 responden, mayoritas memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 76 orang atau sebesar 45.78%. Disusul oleh responden dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 45 orang (27.11%) dan responden lainnya sebanyak 20 orang (12.05%). Sementara itu, sebanyak 12 responden (7.23%) memiliki pendidikan terakhir Magister (S2), dan tidak terdapat responden dengan pendidikan Doktorat (S3).

4.3.4 Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan 153 responden pada penelitian ini, jabatan dikategorikan menjadi 6, yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Klasifikasi Berdasarkan Jabatan

Keterangan	Jumlah	Presentase
Staf/Pegawai	119	77.78%
Supervisor/Koordinator	8	5.23%
Manajer/Kepala Bagian	3	1.96%
Direktur/Kepala Instansi	0	0%
Auditor/Internal Control	9	5.88%
Pegawai Administrasi	4	2.61%
Lainnya	10	6.54%
Total	153	100%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden berasal dari jabatan Staf/Pegawai yaitu sebanyak 119 orang (77,78%), diikuti oleh Auditor/Internal Control sebanyak 9 orang (5,88%), dan Supervisor/Koordinator sebanyak 8 orang (5,23%). Responden dengan jabatan Lainnya berjumlah 10 orang (6,54%), Pegawai Administrasi 4 orang (2,61%), dan Manajer/Kepala Bagian 3 orang (1,96%).

4.3.5 Berdasarkan Jenis Organisasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan 153 responden, jenis OPD dikategorikan menjadi 6, yang dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Klasifikasi Berdasarkan OPD

Keterangan	Jumlah	Presentase
Sekretariat Daerah	0	0%
Sekretariat DPRD	0	0%
Inspektorat	1	5.9%
Dinas Daerah	10	58.8%
Badan Daerah	4	23.5%
Kemantren	1	5.9%
Lainnya	1	5.9%
Total	17	100%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan distribusi responden berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat mereka bekerja. Dari data yang diperoleh, disimpulkan jumlah OPD yang menjadi responden didominasi oleh Dinas Daerah yakni sebanyak 58.8%, kemudian Badan Daerah sebanyak 23.5%, Inspektorat 5.9%, Kemantren 5.9%, dan lainnya yakni Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 5.9%.

4.3.6 Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan 153 responden, masa kerja dikategorikan menjadi 6, yang dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Klasifikasi Berdasarkan Masa Kerja

Keterangan	Jumlah	Presentase
<1 tahun	0	0%
1-5 tahun	68	44,44%
6-10 tahun	26	16,99%
11-15 tahun	20	13,07%
16-20 tahun	18	11,76%
>20 tahun	21	13,73%
Total	153	100%

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel di atas menyajikan data klasifikasi responden berdasarkan masa kerja. Mayoritas responden memiliki masa kerja 1–5 tahun sebanyak 68 orang (44,44%), diikuti oleh masa kerja 6–10 tahun sebanyak 26 orang (16,99%), dan >20 tahun sebanyak 21 orang (13,73%). Responden dengan masa kerja 11–15 tahun berjumlah 20 orang (13,07%), sedangkan yang memiliki masa kerja 16–20 tahun sebanyak 18 orang (11,76%). Tidak terdapat responden dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

4.4 Hasil Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

4.4.1 Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan 2 tahapan uji validitas, yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas deskriminan.

4.4.1.1 Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur korelasi antara suatu konstruk dengan indikator lain yang merepresentasikan konsep yang sama. Validitas konvergen dianggap terpenuhi apabila nilai *Average Variance Extracted* (AVE) melebihi 0,5 dan nilai *loading*

lebih besar dari 0,7. (Bagozzi dan Yi, 1988; Wong, 2013). Nilai loading dan AVE pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Uji Validitas Konvergen

No.	Variabel	Kode	<i>Outer Loading</i>	AVE
1.	Perlindungan Hukum (PH)	PH1	0.727	0.620
		PH2	0.808	
		PH3	0.820	
		PH4	0.809	
		PH5	0.769	
2.	Saluran Pelaporan Anonim (SPA)	SPA1	0.727	0.615
		SPA2	0.770	
		SPA3	0.787	
		SPA4	0.848	
3.	Tingkat Keseriusan Kecurangan (TKK)	TKK1	0.782	0.712
		TKK2	0.885	
		TKK3	0.866	
		TKK4	0.838	
4.	<i>Personal cost of reporting</i> (PCR)	PCR1	0.820	0.675
		PCR2	0.877	
		PCR3	0.754	
		PCR4	0.810	
		PCR5	0.843	
5.	Religiusitas (R)	R1	0.859	0.714
		R2	0.907	
		R3	0.855	
		R4	0.751	
6.	Niat <i>Whistleblowing</i> (NW)	NW1	0.877	0.730
		NW2	0.899	
		NW3	0.808	
		NW4	0.862	
		NW5	0.822	

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *outer loading* setiap indikator yang melebihi 0.7 serta nilai AVE untuk masing-masing variabel yang lebih besar dari 0.5.

4.4.1.2 Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk melihat apakah setiap konstruk dalam model memang berbeda satu sama lain secara empiris (Hair *et al.*, 2021). Evaluasi validitas diskriminan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu dengan melihat nilai *cross-loading* dan metode Fornell-Larcker. Pada penelitian ini, hasil nilai *cross-loading* tersaji pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Cross-Loading

	NW	PCR	PH	R	SPA	TKK
NW1	0.877	0.378	0.346	0.220	0.343	0.345
NW2	0.899	0.477	0.355	0.259	0.364	0.390
NW3	0.808	0.401	0.410	0.184	0.268	0.380
NW4	0.862	0.417	0.379	0.297	0.296	0.383
NW5	0.822	0.426	0.324	0.165	0.297	0.336
PCR1	0.408	0.820	0.234	0.252	0.108	0.380
PCR2	0.455	0.877	0.290	0.291	0.194	0.336
PCR3	0.405	0.754	0.355	0.329	0.321	0.331
PCR4	0.377	0.810	0.364	0.304	0.321	0.242
PCR5	0.371	0.843	0.266	0.149	0.187	0.350
PH1	0.400	0.363	0.727	0.199	0.301	0.264
PH2	0.334	0.261	0.808	0.135	0.278	0.362
PH3	0.291	0.295	0.820	0.201	0.409	0.378
PH4	0.306	0.259	0.809	0.211	0.268	0.331
PH5	0.310	0.237	0.769	0.265	0.302	0.301
R1	0.283	0.292	0.212	0.859	0.274	0.308
R2	0.188	0.271	0.240	0.907	0.246	0.215
R3	0.211	0.286	0.233	0.855	0.253	0.190
R4	0.186	0.240	0.183	0.751	0.210	0.106
SPA1	0.172	0.189	0.338	0.210	0.727	0.251
SPA2	0.246	0.162	0.386	0.167	0.770	0.129
SPA3	0.233	0.170	0.313	0.251	0.787	0.143
SPA4	0.407	0.291	0.263	0.277	0.848	0.252
TKK1	0.248	0.299	0.289	0.224	0.213	0.782
TKK2	0.449	0.403	0.420	0.316	0.274	0.885
TKK3	0.322	0.326	0.331	0.136	0.130	0.866
TKK4	0.381	0.305	0.328	0.165	0.208	0.838

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel *cross-loading* di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas, karena setiap indikator memiliki korelasi yang jauh lebih tinggi terhadap konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Untuk mendukung penilaian validitas diskriminan secara lebih mendalam, digunakan pendekatan Fornell-Larcker *Criterion*. Menurut kriteria ini, akar kuadrat dari nilai AVE yang terletak pada diagonal tabel harus lebih besar dibandingkan seluruh nilai korelasi lainnya dalam baris dan kolom yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa suatu konstruk harus memiliki korelasi yang lebih kuat dengan indikator-indikatornya sendiri daripada dengan indikator konstruk lain (Hair *et al.*, 2021). Hasil evaluasi menggunakan Fornell-Larcker *Criterion* ditampilkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Fornell-Larcker *Criterion*

	NW	PCR	PH	R	SPA	TKK
NW	0.854					
PCR	0.493	0.822				
PH	0.425	0.366	0.787			
R	0.265	0.325	0.257	0.845		
SPA	0.368	0.273	0.395	0.295	0.784	
TKK	0.430	0.400	0.413	0.255	0.250	0.844

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Merujuk pada hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa akar kuadrat dari nilai AVE untuk setiap konstruk yang terletak pada diagonal tabel memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan dengan baik.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu instrument penelitian dalam mengukur konsep yang dimaksud. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's *Alpha* lebih dari 0.70, yang menunjukkan bahwa item-item dalam instrument tersebut memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur variabel yang sama (Ghozali, 2018).

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu Niat *Whistleblowing*, Perlindungan Hukum, *Personal cost of reporting*, Saluran Pelaporan Anonim, Tingkat Keseriusan Kecurangan, dan Religiusitas. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
1.	Perlindungan Hukum (PH)	0.847	0.850
2.	Saluran Pelaporan Anonim (SPA)	0.803	0.886
3.	Tingkat Keseriusan Kecurangan (TKK)	0.867	0.900
4.	<i>Personal cost of reporting</i> (PCR)	0.879	0.883
5.	Religiusitas (R)	0.866	0.895
6.	Niat <i>Whistleblowing</i> (NW)	0.907	0.909

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan seperti tabel di atas, nilai cronbach's *alpha* dan *composite reliability* menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.70. maka, hasil tersebut menunjukkan jika semua variabel sudah reliabel.

4.5 Hasil Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam penelitian ini, pengujian *inner model* diuji menggunakan tiga metode, yaitu dengan memeriksa nilai koefisien determinasi (R^2), menerapkan

metode PLS *Predict*, serta melakukan pengujian terhadap nilai *Goodness of Fit* (GoF).

4.5.1 Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Koefisien determinasi (*R-Squared*) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R^2 , maka semakin besar proporsi varians dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Hair, 2022).

Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* SmartPLS. Hasil pengujian nilai R^2 untuk masing-masing variabel dependen ditampilkan dalam Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 *R-Squared*

	<i>R-Squared</i>	<i>Adjusted R-Squared</i>
Niat <i>Whistleblowing</i> (NW)	0.374	0.348

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai *R-squared* dalam penelitian ini sebesar 0.374. Artinya, sekitar 37.4% variasi yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat dalam model. Dengan demikian, model ini dinilai memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti, meskipun masih terdapat sekitar 62.6% variasi yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

4.5.2 PLS Predict

PLS *Predict* merupakan metode yang digunakan untuk melihat kemampuan model dalam memprediksi indikator pada variabel dependen. Dengan menggunakan fitur ini di SmartPLS 4, peneliti dapat mengetahui apakah model yang dibangun memiliki kemampuan prediktif yang baik atau tidak. Dalam analisis ini, hasil prediksi dari model PLS dibandingkan dengan hasil dari model regresi linear, dan dilihat juga nilai-nilai seperti RSME (*Root Mean Square Error*), MAE (*Mean Absolute Error*), dan Q^2_{predict} (Hair, 2022). Berikut adalah hasil dari pengujian PLS *Predict* yang bisa dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 PLS Predict

	Q ² Predict	Hasil PLS		Hasil LM	
		RMSE	MAE	RMSE	MAE
NW1	0.169	0.690	0.504	0.725	0.529
NW2	0.264	0.624	0.433	0.660	0.466
NW3	0.221	0.662	0.482	0.747	0.550
NW4	0.224	0.698	0.497	0.745	0.534
NW5	0.183	0.812	0.621	0.863	0.640

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item pengukuran variabel endogen (Niat *Whistleblowing*) model PLS yang diajukan mempunyai nilai RMSE dan MAE lebih rendah dari model LM (Regresi linier), maka model PLS yang diajukan mempunyai kekuatan prediksi tinggi.

4.5.3 Goodness of Fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) digunakan untuk mengukur seberapa baik model secara keseluruhan dapat menjelaskan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam pendekatan *Partial Least Square* (PLS), nilai GoF dihitung berdasarkan

nilai AVE (*Average Variance Extracted*) dan R^2 (koefisien determinasi) dari konstruk endogen. Semakin tinggi nilai GoF, maka semakin baik model tersebut dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian (Hair, 2022). Menurut Tenenhaus *et al.* (2005), nilai GoF dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkat, yaitu 0.1 (rendah), 0.35 (sedang), dan 0.36 (tinggi).

Dengan demikian, untuk mengetahui nilai *Goodness of Fit* (GoF) dalam penelitian ini, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{GoF} = \sqrt{(0.730 \times 0.374)} = 0.522$$

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa tingkat Goodness of Fit (GoF) dalam penelitian ini tergolong tinggi, sehingga mencerminkan kesesuaian model yang kuat terhadap data yang dianalisis.

4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrapping* pada aplikasi SmartPLS 4. Metode ini digunakan untuk menguji apakah hubungan antar variabel dalam model struktural signifikan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t-statistik, yang kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi tertentu (Hair, 2022). Penelitian ini menggunakan tiga tingkat signifikansi untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan, yaitu: 1%, 5%, dan 10%. Jika nilai t-statistik melebihi nilai t-tabel pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka hipotesis dinyatakan diterima. Sebaliknya, jika nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel, maka hipotesis dinyatakan ditolak.

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini, ditunjukkan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Konstruk	<i>Path Coefficient</i>	T-statistik	Hasil
H1	PH → NW (+)	0.170	2.303**	Terdukung
H2	SPA → NW (+)	0.154	1.979**	Terdukung
H3	TKK → NW (+)	0.188	1.989**	Terdukung
H4	PCR → NW (-)	0.287	3.246***	Tidak Terdukung
H5	R*PCR → NW (+)	0.069	0.921	Tidak Terdukung

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Signifikansi 0.01*** dan 0.05**

Dari hasil pengujian hipotesis yang ditampilkan pada Tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. H1 – Perlindungan Hukum (PH) → Niat *Whistleblowing* (NW)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perlindungan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*, dengan $\beta = 0.170$, t-statistik = 2.303, dan p-value = 0.021. Seluruh indikator memenuhi kriteria signifikansi ($\beta > 0.1$, $t > 1.96$, $p < 0.05$), sehingga **H1 didukung**.

2. H2 – Sistem Pelaporan Anonim (SPA) → Niat *Whistleblowing* (NW)

Diperoleh hasil $\beta = 0.154$, t-statistik = 1.979, dan p-value = 0.048, ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan. Seluruh indikator memenuhi kriteria signifikansi ($\beta > 0.1$, $t > 1.96$, $p < 0.05$), sehingga **H1 didukung**.

3. H3 – Tingkat Keseriusan Kecurangan (TKK) → Niat *Whistleblowing* (NW)

Nilai pengujian menunjukkan $\beta = 0.188$, t-statistik = 1.989, dan p-value = 0.047. Karena semua nilai berada dalam batas signifikansi, maka **H3 didukung**.

4. H4 – *Personal cost of reporting* (PCR) → Niat *Whistleblowing* (NW)

Hasil menunjukkan nilai $\beta = 0.287$, t-statistik = 3.246, dan p-value = 0.001, ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan. Seluruh indikator memenuhi kriteria signifikansi ($\beta > 0.1$, $t > 1.96$, $p < 0.05$). Oleh karena itu,

H4 tidak didukung.

5. Moderasi Religiusitas (R^*PCR) terhadap hubungan PCR → NW

Nilai moderasi $\beta = 0.069$, t-statistik = 1.044, dan p-value = 0.296, tidak memenuhi kriteria signifikansi, sehingga **H5 tidak didukung.**

4.7 Pembahasan Hipotesis

Pada bagian ini akan dibahas hasil pengujian hipotesis sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada interpretasi hasil pengujian serta kesesuaiannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Adapun pembahasan masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh Perlindungan Hukum Terhadap Niat Whistleblowing

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perlindungan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik perlindungan hukum yang dirasakan oleh individu, maka semakin tinggi pula niat mereka untuk melaporkan tindakan kecurangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendi dan Nuraini (2019) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* merupakan faktor penting dalam mendorong keberanian seseorang untuk melaporkan pelanggaran.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap kontrol perilaku, termasuk persepsi akan perlindungan atau risiko. Perlindungan hukum bertindak sebagai bentuk *perceived behavioral control* yang dapat memperkuat niat untuk melakukan pelaporan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi seperti undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta kebijakan internal pemerintahan daerah yang mendukung *whistleblowing system*, dapat menciptakan iklim pelaporan yang lebih aman dan kondusif. Pegawai cenderung tidak akan melaporkan suatu pelanggaran apabila mereka merasa tidak ada perlindungan yang memadai dari lembaga atau sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap efektivitas perlindungan hukum menjadi kunci utama dalam meningkatkan keberanian untuk melakukan *whistleblowing*.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum memegang peran sentral dalam meningkatkan niat *whistleblowing*, sehingga seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, ASN, dan masyarakat—perlu mengambil bagian aktif dalam menciptakan ekosistem pelaporan yang aman dan terpercaya. Pemerintah dituntut untuk memperkuat regulasi yang mendukung perlindungan pelapor melalui kebijakan internal maupun regulasi daerah yang jelas dan berpihak, seperti pembentukan tim pelindung pelapor yang independen serta penerapan sistem *whistleblowing* yang aman dan terstandarisasi. Bagi ASN,

jaminan perlindungan hukum akan menumbuhkan rasa aman dalam melaporkan pelanggaran, sehingga penting untuk diberikan edukasi berkelanjutan mengenai hak-hak pelapor dan prosedur pelaporan yang tepat. Sementara itu, bagi masyarakat luas, kehadiran perlindungan hukum yang efektif akan membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap potensi penyimpangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi *whistleblowing system* sangat bergantung pada sinergi semua pihak dalam menjadikan perlindungan hukum sebagai fondasi utama dari budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

4.7.2 Pengaruh Saluran Pelaporan Anonim Terhadap Niat *Whistleblowing*

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa saluran pelaporan anonim memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya sistem pelaporan yang menjamin anonimitas pelapor dapat meningkatkan keinginan individu untuk melaporkan kecurangan. Ditinjau dari perspektif *Theory of Planned Behaviour* (TPB), hasil ini dapat dijelaskan melalui konstruk *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana individu merasa memiliki kontrol atau kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tanpa hambatan berarti. Dalam konteks ini, sistem pelaporan anonim memperkuat persepsi individu bahwa mereka dapat melakukan pelaporan tanpa menghadapi risiko langsung, sehingga meningkatkan niat untuk bertindak. Anonimitas juga dapat memperkuat sikap positif terhadap perilaku *whistleblowing* dan mengurangi tekanan dari norma sosial yang kerap menjadi penghambat

pelaporan, seperti ketakutan dikucilkan atau dianggap melanggar loyalitas kelompok.

Hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salfitri dan Coryanata (2024). Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan mekanisme pelaporan anonim dapat meningkatkan niat untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil ini konsisten dengan temuan Harahap *et al.* (2020), yang mengungkapkan bahwa individu cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk melaporkan pelanggaran apabila tersedia jalur pelaporan yang menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Temuan ini mendukung teori *whistleblowing* dan studi empiris yang menyebutkan bahwa sistem pelaporan anonim meningkatkan keamanan psikologis pelapor.

Implikasi dari hasil ini menegaskan pentingnya peran semua pemangku kepentingan dalam mendukung dan mengimplementasikan sistem pelaporan anonim yang efektif. Pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang mendukung kerahasiaan pelapor melalui regulasi formal dan pengawasan pelaksanaan sistem pelaporan yang aman. ASN sebagai pelaku utama dalam birokrasi perlu diberikan pemahaman serta pelatihan mengenai pentingnya saluran pelaporan anonim sebagai wujud kepedulian terhadap integritas organisasi. Implementasi sistem digital, kotak pengaduan, maupun layanan pihak ketiga yang terpercaya merupakan bentuk nyata yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan budaya pelaporan yang aman, terbuka, dan bertanggung jawab.

4.7.3 Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat

Whistleblowing

Pengujian menunjukkan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Semakin serius dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kecurangan, maka semakin besar kemungkinan seseorang akan melaporkannya.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behaviour* (TPB), temuan ini berkaitan erat dengan aspek *attitude toward the behavior*, di mana persepsi individu terhadap dampak suatu tindakan memengaruhi penilaian mereka terhadap nilai dari pelaporan tersebut. Ketika seseorang menilai bahwa kecurangan yang terjadi memiliki konsekuensi serius, sikap mereka terhadap tindakan *whistleblowing* cenderung menjadi lebih positif karena dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perlindungan kepentingan bersama. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan apabila seseorang melakukan pelanggaran dengan tingkat keseriusan yang tinggi atau yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius, maka kecenderungan anggota organisasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut akan semakin tinggi (Alwi & Helmayunita, 2020; Ainun, 2021)

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, ASN, dan masyarakat—perlu bersama-sama membangun pemahaman bersama mengenai dampak serius dari tindak kecurangan terhadap stabilitas pemerintahan, integritas organisasi, dan kepercayaan publik. Pemerintah perlu memperkuat edukasi antikorupsi dan nilai-nilai integritas melalui

program pelatihan dan kampanye publik yang menyoroti konsekuensi nyata dari kecurangan terhadap pelayanan publik dan keuangan negara. ASN perlu dibekali pemahaman bahwa melaporkan kecurangan serius adalah bagian dari tanggung jawab profesional dan sosial. Sementara masyarakat luas harus didorong untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan publik, dengan memahami bahwa pelaporan terhadap kecurangan bukan sekadar hak, melainkan kewajiban moral demi kepentingan bersama. Dengan membangun pemahaman ini secara luas, niat untuk melakukan *whistleblowing* terhadap kecurangan serius dapat tumbuh lebih kuat dalam lingkungan yang mendukung integritas.

4.7.4 Pengaruh Personal Cost of Reporting Terhadap Niat Whistleblowing

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi seseorang terhadap *personal cost of reporting*, maka akan semakin rendah keinginan mereka untuk melakukan *whistleblowing*. Dengan kata lain, hipotesis ini berarah negatif, didasarkan pada anggapan bahwa potensi kerugian pribadi—seperti risiko pembalasan, kehilangan pekerjaan, tekanan psikologis, atau kerusakan reputasi—dapat menjadi hambatan bagi individu untuk melaporkan tindakan kecurangan. Pandangan ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu seperti Busra *et al.* (2019), yang menemukan bahwa adanya *personal cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap niat melakukan pelaporan. Hal serupa juga disampaikan oleh Mustopa *et al.* (2020), yang menyatakan bahwa semakin besar risiko pribadi yang dirasakan, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk menjadi *whistleblower*.

Namun demikian, temuan dalam penelitian ini justru tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyani dan Dewi (2023) serta Syafrudin et al. (2020), yang menunjukkan bahwa risiko pribadi tidak selalu menjadi hambatan utama dalam pelaporan pelanggaran. Justru, dalam situasi tertentu, adanya *personal cost* dapat menjadi indikator dari keberanian moral dan integritas pelapor, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau posisi strategis dalam organisasi.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behaviour*, temuan ini berkaitan dengan komponen *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana individu merasa mampu untuk melakukan suatu tindakan meskipun menghadapi hambatan atau risiko. Ketika individu merasa memiliki kendali atau keberanian untuk bertindak di tengah risiko personal, maka intensi untuk melakukan *whistleblowing* tetap dapat terbentuk secara positif.

Implikasi dari hasil ini menegaskan pentingnya peran semua pemangku kepentingan—pemerintah, ASN, dan masyarakat—dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberanian untuk melapor. Pemerintah perlu menyediakan sistem pelaporan yang aman, menghargai keberanian pelapor, serta menjamin perlindungan terhadap dampak negatif yang mungkin dialami. ASN perlu dibekali nilai-nilai etika dan keberanian moral agar mampu menghadapi dilema integritas dengan kepala tegak. Pembekalan ini dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan *workshop* seperti Program Pelatihan Refleksi dan aktualisasi Integritas (PRESTASI) yang diselenggarakan oleh KPK dengan delapan mata pelatihan meliputi strategi kebijakan Pembangunan integritas ASN,

internalisasi integritas, dilema integritas, dan keberanian moral. Program pelatihan etika dan pergaulan yang mencakup *code of ethics* dan *code of conduct* bisa menjadi upaya yang efektif dalam membentuk karakter ASN yang berintegritas. Selain itu metode klasik dengan pendekatan tatap muka juga bisa menjadi salah satu upaya yang efektif, dengan melalui diskusi kelompok yang dapat membantu ASN lebih aktif dalam bertanya dan menerima solusi secara langsung dari narasumber. Sementara masyarakat perlu memberikan dukungan sosial terhadap pelapor agar tindakan *whistleblowing* tidak dipandang sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui dukungan kolektif ini, niat untuk melaporkan kecurangan dapat tumbuh meskipun dalam kondisi penuh risiko.

4.7.5 Religiusitas Memoderasi Hubungan *Personal Cost of Reporting* dengan Niat *Whistleblowing*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa religiusitas tidak memoderasi pengaruh *personal cost of reporting* terhadap niat *whistleblowing*. Artinya, seberapa tinggi tingkat religiusitas seseorang tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara persepsi risiko pribadi dengan niat untuk melaporkan kecurangan. Dalam konteks ini, ketika individu dihadapkan pada risiko seperti tekanan dari atasan, potensi kehilangan pekerjaan, atau kerusakan hubungan sosial, nilai-nilai keagamaan yang dimilikinya tidak selalu menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk bertindak sebagai pelapor.

Dari sudut pandang *Theory of Planned Behaviour*, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun religiusitas dapat memengaruhi norma subjektif—yakni persepsi tentang apa yang dianggap benar menurut nilai-nilai sosial atau agama—hal tersebut tidak cukup kuat untuk memengaruhi *perceived behavioral control* atau keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menghadapi risiko personal ketika melakukan *whistleblowing*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Zullaekhaa dan Nustini (2024) yang menyatakan bahwa nilai religius tidak selalu tercermin dalam perilaku organisasi, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan etis yang berisiko tinggi. Meskipun dalam ajaran Islam, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* mendorong umat untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, implementasinya dalam dunia kerja seringkali dibatasi oleh dinamika lingkungan seperti budaya organisasi, kekuatan struktur birokrasi, dan ketidakpastian terhadap perlindungan hukum.

Implikasi dari hasil ini penting untuk dicermati oleh pemerintah, ASN, dan masyarakat. Pemerintah perlu memahami bahwa pembangunan karakter religius saja belum cukup untuk mendorong perilaku *whistleblowing* jika tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan dan sistem pendukung yang memadai. ASN perlu mendapatkan edukasi yang menekankan pentingnya keberanian moral yang tidak hanya bersumber dari nilai agama, tetapi juga dari sistem organisasi yang mendukung integritas. Sementara masyarakat sebagai pengawas eksternal diharapkan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang menghargai pelaporan kecurangan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, bukan sekadar dorongan

spiritual. Dengan begitu, pencegahan kecurangan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui kombinasi nilai moral dan sistem perlindungan yang konkret.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perlindungan hukum, *personal cost of reporting*, saluran pelaporan anonim, dan tingkat keseriusan kecurangan terhadap niat *whistleblowing*, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini terdiri dari 153 staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Perlindungan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat jaminan perlindungan hukum yang dirasakan, semakin besar kecenderungan pegawai untuk melaporkan kecurangan.
2. Saluran pelaporan anonim memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*, yang berarti keberadaan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dapat mendorong niat untuk melaporkan kecurangan.
3. Tingkat keseriusan kecurangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Pegawai yang memandang kecurangan sebagai hal serius lebih terdorong untuk melaporkannya.
4. *Personal cost of reporting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Semakin tinggi kesadaran individu terhadap potensi risiko pribadi yang mungkin timbul akibat melakukan *whistleblowing*, justru semakin

mendorong mereka untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki integritas tinggi dan keberanian moral tetap terdorong untuk melakukan *whistleblowing* meskipun menyadari adanya risiko yang mungkin dihadapi.

5. Religiusitas tidak memoderasi pengaruh *personal cost of reporting* terhadap niat *whistleblowing*. Tingkat religiusitas individu tidak memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara persepsi risiko pribadi dan niat *whistleblowing*.

5.1 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini memperluas kajian literatur terkait perilaku etis di sektor publik, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat *whistleblowing*. Dengan menggabungkan variabel perlindungan hukum, *personal cost of reporting*, saluran pelaporan anonim, tingkat keseriusan kecurangan, serta religiusitas sebagai variabel moderasi, penelitian ini turut memperkaya pemahaman terhadap determinan niat pelaporan kecurangan di lingkungan birokrasi pemerintah daerah. Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan masukan penting bagi instansi pemerintah daerah dalam merancang strategi untuk memperkuat sistem pelaporan kecurangan. Temuan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan internal yang mendorong budaya pelaporan serta memperkuat aspek kepercayaan dan perlindungan bagi pelapor.

Penelitian ini juga menghasilkan beberapa implikasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, antara lain:

1. Bagi pemerintah, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi pelapor sebagai bentuk nyata dari komitmen antikorupsi. Dukungan hukum yang tegas tidak hanya akan meningkatkan rasa aman bagi pelapor akan biaya pribadi, tetapi juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan internal. Kemudian terkait dengan penyediaan saluran pelaporan anonim yang menjamin kerahasiaan dan keamanan bagi *whistleblower*, menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Saluran ini harus didesain agar mudah diakses, bersifat *user-friendly*, dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan, guna membangun kepercayaan dari para pegawai. Pemerintah juga sebaiknya menaruh perhatian serius terhadap klasifikasi pelanggaran berdasarkan tingkat keseriusannya, karena temuan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keseriusan kecurangan, semakin besar pula keinginan untuk melaporkan, sehingga pelanggaran yang berdampak besar harus menjadi prioritas dalam pengawasan dan penegakan hukum.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), hasil penelitian ini menekankan pentingnya pembangunan karakter dan keteladanan etis dalam lingkungan birokrasi. Meskipun terdapat *personal cost* atau risiko pribadi yang mungkin timbul dari tindakan pelaporan, ASN justru perlu memaknainya sebagai bentuk integritas dan keberanian moral dalam menjalankan tugas publik. Hasil temuan menunjukkan bahwa ASN yang memiliki prinsip kuat akan tetap memilih untuk bersuara demi kebenaran, meskipun dihadapkan pada potensi ancaman. Oleh karena itu, pembinaan etika, pemahaman atas tingkatan pelanggaran,

tetap perlu ditegakkan sebagai landasan moral dalam pengambilan keputusan, terutama ketika berada dalam situasi dilematis.

3. Sementara itu, bagi Masyarakat sebagai pengawas independen, perlu menggarisbawahi akan pentingnya peran aktif dalam mendukung terciptanya iklim pelaporan pelanggaran yang sehat dan bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam mendorong keterbukaan informasi dan mendorong individu di sekitarnya untuk berani melaporkan pelanggaran yang ditemukan, terutama jika kecurangan tersebut tergolong serius dan berdampak luas. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat adalah membentuk atau memperkuat forum-forum pemantauan publik di lingkungan sosial. Selain itu juga, Masyarakat diharapkan untuk tidak menciptakan stigma negatif terhadap pelapor, karena sesungguhnya seorang pelapor adalah seorang pemberani yang membawa perubahan baik bagi sekitarnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan sampel yang hanya terdiri dari pegawai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
2. Meskipun penelitian ini telah menggunakan sejumlah variabel yang cukup banyak, namun masih terbatas pada beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Oleh karena itu, tidak

menutup kemungkinan terdapat variabel lain yang juga relevan namun belum tercakup dalam penelitian ini.

5.3 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

1. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan sampel, tidak hanya terbatas pada pegawai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta saja.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memasukkan variabel lain yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk keputusan seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*.
- ACFE Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia*.
- Ainun, A., Maslichah, & Sudaryani, D. (2021). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Keinginan Untuk Melakukan *Whistleblowing* (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di Universitas Islam Malang dan Universitas Negeri Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(10), 32–43.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alderman, A. K., & Salem, B. (2010). Survey research. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 126(4), 1381–1389. <https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e3181ea44f9>
- Ali, N., & Rusmanto, T. (2022). *The Effect of Adoption of Artificial Intelligence as Whistleblowing Practice with the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Approach: A Case Study on Auditors in DKI Jakarta*.
- Alwi, H., & Helmayunita, N. (2020). Pengaruh Sikap, Personal Cost of Reporting, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan terhadap Intention *Whistleblowing* Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2445–2465. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/20>
- Andrade, C. (2021). The Inconvenient Truth About Convenience and Purposive Samples. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 43(1), 86–88. <https://doi.org/10.1177/0253717620977000>
- Annisaa, Z., & Nurlaeli, S. (2022). Determinants of *Whistleblowing* Intentions: The Role of Education in Building Personal Integrity. *Asia Pacific Fraud Journal*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v7i1.262>
- Ardi, & Isnayanti. (2020). Structural Equation Modelling-Partial Least Square to Determine the Correlation of Factors Affecting Poverty in Indonesian Provinces. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 846(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/846/1/012054>
- Asiamah, Nestor & Mensah, Henry Kofi & Oteng-Abayie, Eric Fosu. (2022). Non-Probabilistic Sampling in Quantitative Clinical Research: A Typology and Highlights for Students and Early Career Researchers. *International Journal of Applied Research on Public Health Management*. 7. 1-18. 10.4018/IJARPHM.290379.
- Ayem, S., & Rumdoni. (2021). 11-Rumdoni+150-164. 12(2), 150–162.
- Baruwati, F., & Fathmaningrum, E. S. (2023). Determinan Intensi Melakukan *Whistleblowing* dengan Retaliasi dan Dukungan Organisasi Sebagai

- Variabel Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 421–441. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19945>
- Busra, Nur & Ahyaruddin, Muhammad. (2019). Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan, Personal Cost, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Melakukan Whistleblowing. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*. 1. 11-20. 10.37859/mrabj.v1i1.1545.
- Cahyani, N. L. M. A. D. (2022). *Pengaruh Tingkat Keseriusan Pelanggaran, Personal Cost, Komitmen Profesional, dan Self Efficacy terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing (Studi Empiris pada Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Penebel)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Chandrani, A., Gamayumi, R. R., & Listyaningsih, E. (2023). Intensi Whistleblowing Auditor: Peran Perlindungan Hukum sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(3), 221–234. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i3.1389>
- Chin. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. <https://www.researchgate.net/publication/311766005>
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tanmbunan, H., Sylvia, D., Adyana, M. D. D., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Dedi R (2023). Pengantar Partial Least Squares Structural Equation Model (PLS-SEM) 2023. Rahayu, U. A., & Astuti, C. D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intention Whistleblowing. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 111–117. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.201>
- Efendi, A. '. (2019). Pengaruh Perlindungan Hukum, Orientasi Etika Idealisme, Orientasi Etika Relativisme dan Retaliasi Terhadap Intensi Whistleblowing (Survei Pada Mahasiswa Universitas Negeri di Provonsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 504–519.
- Eleonora, P. (2024). Religiosity: Is It Mainly Linked to Mental Health or to Psychopathology? *Religions*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/rel15070811>
- Ghina Sukarya, A., Sheva, M., Salam, M., Yudiantoro, N. A., & Indonesia, U. (2024). Enron Corporation: Studi Kasus Tentang Peran Etika Bisnis Dalam Pandangan Etika Terapan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 116–125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13360166>

- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, teknik, aplikasi menggunakan Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris*.
- Hair, F.J, Risher, J., J, Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2018). The Results of PLS-SEM Article Information. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Hair, J. F., Astrachan, C. B., Moisescu, O. I., Radomir, L., Sarstedt, M., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2021). Executing and interpreting applications of PLS-SEM: Updates for family business researchers . *Journal of Family Business Strategy*.
- Harahap, H. F., Misra, F., & Firdaus, F. (2020). Pengaruh Jalur Pelaporan dan Komitmen Religius terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*: Sebuah Studi Eksperimen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 130. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24289>
- Hastuti, T. D., Indarto, S. L., & Claudia, G. (2023). Could Personality, Characteristics of Violations, and Perceptions of the Organizational Environment Be a Factor Driving the *Whistleblowing* Intention? *Business: Theory and Practice*, 24(2), 360–370. <https://doi.org/10.3846/btp.2023.17371>
- Indriani, M., Yulia, A., Nadirsyah, N., & Ariska, L. P. (2019). *Whistleblowing* Intention, Personal Cost, Organizational Commitment and Fraud Seriousness Level. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002121>
- Islami, A. F., & Kurniawati, L. (2023). Analisis Determinan Intensi untuk Melakukan *Whistleblowing* Internal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1026–1042.
- Keputusan Walikota Yogyakarta. (2016). *kepwal-404-2016-tentang-whistleblowing-system-di-lingkungan-pemk-1017*.
- Kumparan. (2024, December 10). 5 Kasus Dugaan Korupsi Tanah Kalurahan di DIY Masuk Penyidikan Sepanjang 2024. *Kumparan*.
- Liani, Y. Y., & Helmayunita, N. (2024). Pengaruh Sifat Machiavellian, Komitmen Profesional, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 72–85. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1169>
- Lola Yustrisia, H. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. 11(75), 95–112. www.lpsk.go.id,
- Miftahul Janna, N. (2021). *Konsep Uji Validitas dan Realibilitas Dengan Menggunakan SPSS*.
- Mike, G. D., & Ajang, J. E. (2022). *Whistleblowing* Intentions: Perceptual Evidence from Future Accountants in Tertiary Institutions in Plateau State, Nigeria. *Nigerian Journal of Public Sector Management*, 5(1).

- Minarso, Christinia & Suprpto, Agung. (2021). Kompetensi Data Librarian Dalam Research Data Management: Systematic Literature Reviews. *Baca: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*. 42. 1. 10.14203/j.baca.v42i1.711.
- Mustafidah, H., Imantoyo, A., & Suwarsito, S. (2020). *Pengembangan Aplikasi Uji-t Satu Sampel Berbasis Web (Development of Web-Based One-Sample t-Test Application)* (Vol. 8, Issue 2).
- Mustopa, K., Kurniawan, A., & Putri, T. E. (2020). The Effect of Attitudes, Organizational Commitments, Severity of Cheating Levels, Personal Cost of Reporting and Job Commitment to *Whistleblowing* Intentions. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 77–95. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01.408>
- Papaleontiou-Louca, E. (2024). *Religiosity: Is It Mainly Linked to Mental Health or to Psychopathology? Religions*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/rel15070811>
- Pramono, A. J., & Aruzzi, M. I. (2023). The implementation of a whistleblowing system as an anti-corruption initiative in Indonesian government institutions. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 195–212. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.942>
- Priyono. (2023, July 29). *Memahami Makna Koefisien Determinasi dan Cara Interpretasinya pada Analisis Regresi Linier*.
- Putra, P., & Wismabrata, H. M. (2023, June 26). *Sempat Divonis Bebas, 11 Koruptor Proyek Tol Padang-Pekanbaru Dihukum Penjara Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sempat Divonis Bebas, 11 Koruptor Proyek Tol Padang-Pekanbaru Dihukum Penjara*. KOMPAS.
- Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum. In *Alauddin Law Development Journal* (Vol. 2).
- Putri, S. A., & Zahroh, F. (2022). Kontrol Perilaku, Komitmen Profesional, Religiusitas dan Niat Melakukan *Whistleblowing*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 2991. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p07>
- Rahmi, M., Fitri, A., Putra, Y. E., Masdar, R., Marlin, K., Negeri, U. I., Yunus Batusangkar, M., Keuangan, A., Padang, P., Id, M. A., & Author, C. (2024). The Role Of Internal Auditor Independence And *Whistleblowing* Systems In Detecting Fraud: Literature Review Peran Independensi Auditor Internal Dan *Whistleblowing* System Dalam Mendeteksi Fraud: Literature Review. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 5, Issue 1). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Salfitri, D. P., & Coryanata, I. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan *Whistleblowing* pada Kecurangan Akademik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4900–4918. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1061>

- Sartika, D., & Mulyani, F. (2020). Pengaruh Sifat Machiavellian, Lingkungan Etika, Komitmen Organisasi, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing* (Studi Empiris pada BPKAD di Kota Padang). *Menara Ilmu*, 1, 24–39. <https://brainly.co.id/tugas/6946450>,
- Sayyida, S., & Anekawati, A. (2012). Penggunaan Analisis Structural Equation Modelling (SEM) Dalam Mengidentifikasi Pengaruh Variabel Moderasi Struktur Desentralisasi Terhadap Hubungan Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial SKPD Di Kabupaten Sumenep. *Prosiding Univeritas Wiraraja*, 1(1).
- Schultz, J. J., Johnson, D. A., Morris, D., & Dyrnes, S. (1993). An Investigation of the Reporting of Questionable Acts in an International Setting. In *Source: Journal of Accounting Research* (Vol. 31).
- Sholihun, & Yanti, H. B. (2021). Determinan Intensi *Whistleblowing* Dengan Insentif *Whistleblowing* Sebagai Variabel Moderasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(1), 35–50. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9151>
- Suhartini, D., Azmiyanti, R., & Putri, S. Y. (2023). *Whistleblowing* Intention in Accounting Students with Locus of Control as a Moderating Variabel. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 25(3), 288–300. <https://doi.org/10.14414/jebav.v25i3.3257>
- Syafrudin, V., Lismawati, L., & Aprila, N. (2020). Pengaruh Sifat Machiavelliane, Personal Cost, Dan Komitmen Profesional Terhadap Niat Untuk Melakukan *Whistleblowing* Pada Pengelola Keuangan Dan Anggaran Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Wilayah Sumatera. *Jurnal Fairness*, 10(3), 195-208.
- Syahputra, E. B., & Urumsah, D. (2019). Deteksi Fraud Melalui Pemerintahan Yang Efektif: Analisis Multi-Grup Gender dan Pengalaman. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 31–42.
- Triafani, M., & Fauzihardani, E. (2024). Pengaruh Personal Cost, Intensitas Moral, dan Sosialisasi Antisipatif terhadap Niat *Whistleblowing*: Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(1), 52–67. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.26>
- Uakarn, C., Chaokromthong, K., & Sintao, N. (2021). *Sample Size Estimation using Yamane and Cochran and Krejcie and Morgan and Green Formulas and Cohen Statistical Power Analysis by G*Power and Comparisons*.
- Wibisono, A., Anwar, M., & Kirono, I. (2015). Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM PLS) Untuk Mengetahui Kinerja Karyawan Pada PT. Dempo Laser Metalindo Surabaya. *Jurnal Statistika*, 7.
- Widi, R., Laboratorium, E., Kesehatan, I., Mulut, G. D., Pencegahan, D., Kedokteran, F., & Universitas Jember, G. (2011). Uji Validitas Dan

- Reliabilitas Dalam Penelitian Epidemiologi Kedokteran Gigi. *Stomatognatic (J.K.G. Unej)*, 8(1), 27–34.
- Widyana Putri, V., Lasdi, L., Effendi, B., & Winda Mulia, T. (2024). Pengaruh Pemberian Reward, Kolektivisme Dan Komitmen Organisasi Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 3(1), 21–32. <https://doi.org/10.47709/jebidi.v3i1.346>
- Wijaya, F. (2020). *Legal Protection for Whistleblower in Criminal Justice System of Indonesia*.
- Willie, M. M. (2023). Defining the Population and Target Population in Clinical Studies: Clarifying Terminology and Enhancing Study Validity. *Journal of Medical and Clinical Nursing Studies*, 1–3. <https://doi.org/10.61440/JMCNS.2023.v1.03>
- Wright, S. (1934). The Method of Path Coefficients. In *Source: The Annals of Mathematical Statistics* (Vol. 5, Issue 3).
- Yustrisia, L. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. 11(75), 95–112. www.lpsk.go.id,
- Zullaekha, R. N., & Nustini, Y. (n.d.). *Niat Menjadi Whistleblower dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisioner Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Di tempat

Assalamualaikum Wr, Wb.

Perkenalkan saya,

Nama : Virgina Septianhie

Prodi : Akuntansi – Sarjana

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Saat ini saya sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir saya sebagai mahasiswa Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “**Pengaruh Perlindungan Hukum, *Personal Cost of Reporting*, Saluran Pelaporan Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat *Whistleblowing* dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi**”. Oleh karenanya, saya mohon kesediaan saudara untuk meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Virgina Septianhie

-----DATA RESPONDEN-----

Untuk bagian berikut dibawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda pada (☐) atau dengan mengisi tempat yang telah tersedia.

Karakteristik Individu

1. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
2. Usia : ☐ < 20 tahun ☐ 40-49 tahun
☐ 20-29 tahun ☐ >49 tahun
☐ 30-39 tahun
3. Pendidikan : ☐ Diploma 3 (D3) ☐ Strata 2 (S2)
☐ Strata 1 (S1) ☐ Strata 3 (S3)
☐ Lainnya (Sebutkan)...
4. Jabatan : ☐ Staf/Pegawai ☐ Auditor/Internal
Control ☐ Supervisor/Koordinator ☐ Pegawai Administrasi
☐ Manajer/Kepala Bagian ☐ Lainnya (Sebutkan)...
☐ Direktur/Kepala Instansi
5. OPD : ☐ Sekertariat Daerah ☐ Dinas Daerah
☐ Sekertariat DPRD ☐ Badan Daerah
☐ Inspektorat ☐ Kemantren
6. Masa Kerja : ☐ < 1 tahun ☐ 11 – 15 tahun
☐ 1 - 5 tahun ☐ 16 - 20 tahun
☐ 6 – 10 tahun ☐ > 20 tahun

-----PERTANYAAN KUISIONER-----

Niat *Whistleblowing*

Whistleblowing adalah salah satu tindakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal, kepada pihak yang berada di dalam maupun luar organisasi.

Untuk bagian berikut dibawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) pada tempat yang tersedia (☐ untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Seberapa besar tingkat persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Silakan gunakan skala yang tersedia di atas.

Bagian 1		Kode: NW		Skor					
				1	2	3	4	5	6
1.	Mengetahui adanya pelanggaran di instansi saya mendorong saya untuk segera melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) tersebut.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Adanya dampak kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran di instansi saya, menumbuhkan niat saya untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) tersebut.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Saya percaya dengan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) akan menciptakan keadaan yang lebih baik kedepannya.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Jika mengetahui adanya pelanggaran di instansi saya, saya akan berusaha melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) melalui jalur resmi internal, seperti kepada atasan atau unit kepatuhan.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Jika saluran internal tidak memungkinkan, saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) melalui jalur eksternal, seperti lembaga penegak hukum atau media.			☐	☐	☐	☐	☐	☐

-----PERTANYAAN KUISIONER-----

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh negara atau institusi hukum untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap individu dari ancaman atau tindakan yang melanggar hukum, baik melalui pengaturan peraturan, mekanisme pengaduan, maupun pemberian keamanan fisik dan psikologis.

Untuk bagian berikut dibawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) pada tempat yang tersedia (☐ untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Seberapa besar tingkat persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Silakan gunakan skala yang tersedia di atas.

Bagian 2		Kode: PH		Skor					
				1	2	3	4	5	6
1.	Saya melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) karena adanya perlindungan hukum pelapor sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Saya terdorong untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) ketika saya merasa aman dari ancaman terhadap diri sendiri, keluarga, dan harta benda.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Jika saya mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum yang adil, saya akan berani melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).			☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, akan mendorong saya untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).			☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Adanya kepastian hukum bagi pelapor membuat saya berani untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).			☐	☐	☐	☐	☐	☐

-----PERTANYAAN KUISIONER-----

Tingkat Keseriusan Kecurangan

Tingkat keseriusan kecurangan adalah ukuran yang mencerminkan sejauh mana suatu tindakan kecurangan berdampak negatif terhadap organisasi, individu, atau masyarakat, baik dari segi finansial, reputasi, maupun moral. Tingkat ini dapat dinilai berdasarkan beberapa faktor, seperti nilai kerugian yang ditimbulkan, durasi terjadinya kecurangan, jumlah pihak yang terlibat, serta pelanggaran terhadap hukum atau kode etik.

Untuk bagian berikut dibawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) pada tempat yang tersedia (☐ untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Seberapa besar tingkat persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Silakan gunakan skala yang tersedia di atas.

Bagian 3		Kode: TKK					
		Skor					
		1	2	3	4	5	6
1.	Setiap tingkatan kecurangan yang terjadi dapat membawa dampak buruk bagi organisasi.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang dilakukan oleh rekan kerja saya meskipun jumlahnya kecil.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran untuk memperoleh keuntungan pribadi mereka.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Seberapa serius pelanggaran tersebut, baik besar maupun kecil, akan memengaruhi keputusan saya untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) tersebut.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

-----PERTANYAAN KUISIONER-----

Saluran Pelaporan Anonim

Saluran pelaporan anonim untuk *whistleblowing* adalah mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis tanpa mengungkap identitasnya.

Untuk bagian berikut dibawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) pada tempat yang tersedia (☐ untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Seberapa besar tingkat persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Silakan gunakan skala yang tersedia di atas.

Bagian 4		Kode: SPA		Skor					
				1	2	3	4	5	6
1.	Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) dengan identitas yang disamarkan.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang terjadi tanpa mengungkapkan informasi pribadi saya.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) jika identitas saya dijaga kerahasiaannya oleh pihak instansi.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang ada, melalui saluran yang dapat dipercaya.			☐	☐	☐	☐	☐	☐

-----PERTANYAAN KUISIONER-----

Personal Cost of Reporting

Personal cost of reporting adalah penilaian karyawan atau anggota organisasi terhadap kemungkinan pembalasan, balas dendam, atau sanksi dari anggota organisasi lain sebagai pihak yang dilaporkan sebagai akibat dari laporan kecurangan atau bukti kecurangan yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

Untuk bagian berikut dibawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) pada tempat yang tersedia (☐ untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Seberapa besar tingkat persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Silakan gunakan skala yang tersedia di atas.

Bagian 5		Kode: PCR		Skor					
				1	2	3	4	5	6
1.	Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) di lingkungan instansi tempat saya bekerja meskipun akan mendapat retaliasi (pembalasan).			☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Terlepas dari berbagai bentuk retaliasi (pembalasan) yang mungkin terjadi, saya tetap bersedia untuk melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).			☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Saya percaya melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) lebih banyak membawa manfaat bagi organisasi.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Saya siap berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>).			☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Saya akan melaporkan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) di lingkungan instansi tempat saya bekerja meskipun akan mendapat retaliasi (pembalasan).			☐	☐	☐	☐	☐	☐

-----PERTANYAAN KUISIONER-----

Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat penghayatan, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan seseorang. Religiusitas mencakup bagaimana seseorang meyakini, memahami, menjalankan, dan mengintegrasikan ajaran agamanya ke dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, pengambilan keputusan, dan perilaku sehari-hari. Religiusitas tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi juga pada sikap, moral, dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai spiritual atau ajaran agama yang diyakini.

Untuk bagian berikut dibawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) pada tempat yang tersedia (☐ untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Seberapa besar tingkat persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Silakan gunakan skala yang tersedia di atas.

Bagian 6		Kode: R		Skor					
				1	2	3	4	5	6
1.	Saya secara rutin mencari dan membaca berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan ajaran agama saya.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Keyakinan agama saya memiliki pengaruh besar terhadap setiap aspek kehidupan saya.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Penting bagi saya untuk mendalami dan mengamalkan kepercayaan yang saya yakini dalam kehidupan.			☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Saya terlibat aktif dan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan kelompok agama di lingkungan sekitar saya.			☐	☐	☐	☐	☐	☐

Lampiran 2 Bukti Telah Melakukan Penelitian

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Hutan Bata 11, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55212
Telp: (0274) 512526, 511980, 525892, Faksimil: (0274) 512526
Email: dandip@pjsk.go.id, Pmsd@pjsk.go.id

Nomor : 000.9/0064
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian
Yth : Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
di
Yogyakarta

25 April 2025

Berdasarkan surat:

Dari : Universitas Islam Indonesia
Nomor : 456/DEK/10/Div.URT/IV/2025
Tanggal : 17 April 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan yang diajukan, maka dapat kami berikan izin penelitian kepada:

Nama : Virginia Septianhe
NIM : 21312144
Prodi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Perlindungan Hukum, Personal Cost of Reporting, Saluran Pelaporan Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan terhadap Niat Whistleblowing dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi
Narahubung : 082262610058

Setelah penelitian selesai dilaksanakan, mahasiswa segera melapor ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.


Agus Setiawan, S.I.P., M.Acc.
NIP. 198206161994031005



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWI MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

4. Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kerinci 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp: (0274) 556917, 515805, 525892
Laman : polpp.jogjakota.go.id, Pms-pi : polpp@pjsk.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 06.N.S.I./99/Satpol PP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.SI
NIP : 197410101993111001
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Virginia Septianhe
Nomor Mahasiswa : 21312144
Fakultas/Program Studi : Fakultas Bisnis dan Ekonomika/ Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar bahwa nama tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian dan wawancara guna menulis Skripsi yang berjudul "Pengaruh Perlindungan Hukum, Personal Cost of Reporting, Saluran Pelaporan Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat Whistleblowing dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi" di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 April 2025


OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.SI
NIP. 197410101993111001

5. Dinas Kesehatan

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**
DINAS KESEHATAN
Widyadarmasatya
Jl. Kerat No. 58, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon 0274515845, 5526251, Faksimile 02741515883
Laman kesehatan.yogyakarta.go.id, Pos-el kesehatan@yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 009.9/169

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Triani Winarsih, S.K.M.,M.M
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : Vignie Septianthe
NIM : 21312144
No Telepon /WA : 082262610058
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan
Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Kesehatan, terhitung mulai 24 April 2025
s.d 2 Mei 2025 dengan judul skripsi :
"Pengaruh Perlindungan Hukum, *Personal Cost of Reporting*, Saluran Pelaporan
Anonim, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan terhadap Niat *Whistleblowing*
dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi "

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Triani Winarsih, S.K.M.,M.M
Penibina Tingkat II (Vib)
NIP. 197006151993032008

Lampiran 3 Tabel Induk Kuisioner

Niat Whistleblowing					Perlindungan Hukum					Personal Cost of Reporting					Saluran Pelaporan Anonim				Tingkat Keseriusan Kecurangan				Religiusitas			
6	6	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	3	5	5	6	6	3	4	4	4	5	3	5
6	6	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4	5	4	5	4	5	6	6	3	4	4	5	4	4	4
4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	2	3	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	3	3	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4
3	4	3	4	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	6	6	6	6	4	5	4	4
5	5	5	5	4	5	5	5	6	6	4	3	3	4	3	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	3	3	3	3	4	4	4	5
5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3
4	4	4	4	4	5	5	6	4	6	3	3	3	3	3	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	4	6	6	6	6	6	4	5	4	5	5	5	6	6	4	5	5	5	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	5	5	5	4	5	4	2	5	6	6	6	6
3	3	3	3	3	5	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	6	4	4	3	3	3	3	4	5	4	5
5	5	5	5	4	5	4	6	5	5	2	2	2	2	2	4	6	5	4	3	3	3	3	4	5	4	5
6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	5	4	5	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	6	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	6	5	6	5	5	5	4	5
3	3	3	3	3	5	4	5	4	5	4	5	3	4	5	4	5	6	5	2	2	2	2	5	5	4	5
5	5	5	5	5	3	5	6	6	5	5	5	4	4	5	6	6	6	6	4	4	4	4	4	5	4	5
3	2	3	2	3	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	6	4	6	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	6	6	4	6	5	5	2	4	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	4	5	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
5	5	6	5	4	3	6	6	6	6	3	3	5	4	3	5	5	6	5	6	5	6	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	3	5	5	5	5

4	5	5	5	3	5	5	5	5	3	3	3	5	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
4	4	5	5	5	5	6	6	5	5	4	4	5	5	4	6	6	5	6	5	5	2	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6	5
5	5	5	5	5	6	4	6	6	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	3	3	6	6	6
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
5	5	4	5	2	4	5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	5
6	6	4	6	5	5	4	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	4	5	6	6
5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	5	3	4	5	5	4	4	5	4	5	3	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5
4	5	5	6	4	5	5	5	6	6	6	4	4	4	5	5	6	6	4	4	5	5	4	5	6	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	4
5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	4	2	2	6	6	4
5	5	6	5	4	5	5	6	5	5	6	5	6	4	4	5	5	6	6	6	5	5	4	5	6	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6
5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	6	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	6	6	6
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	5	3	3	5	6	4	6	6	1	1	6	2	1	6	4	6	5	3	3	3	3	4	5	5
5	6	6	5	6	6	5	5	6	5	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	6	6	6	6	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	3	3	4	3	3	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	2	4	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4

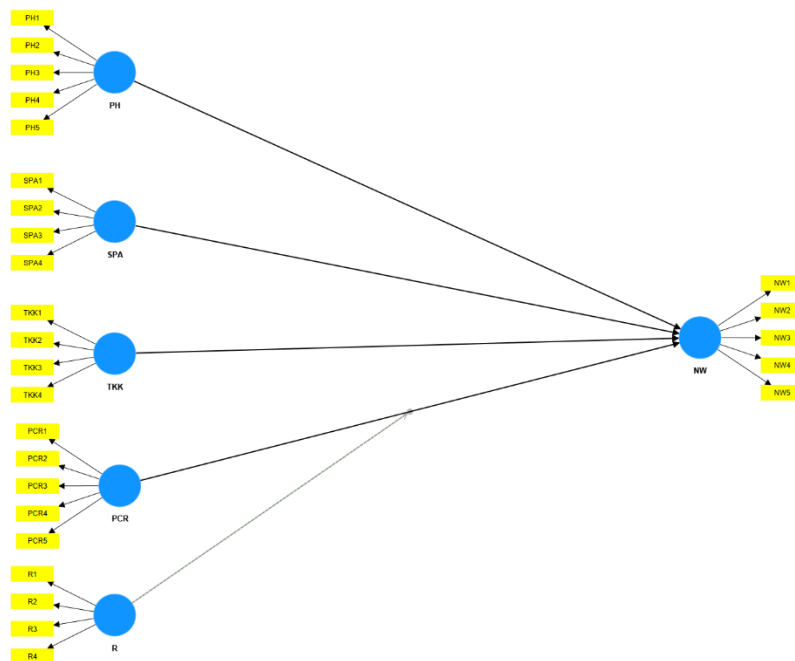
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	3	3	5	4	3	5	5	5	5	6	4	4	4	4	4	5	5
5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	4	6	4	3	4	6	6	6	4
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	6	5	3	3	3	3	4	4	4	4
4	5	5	5	3	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	6	5	4	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	5	5	5	5
5	5	6	6	5	6	5	5	5	6	2	2	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
3	3	4	3	3	4	5	5	5	5	3	3	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	6	4	6	4	4	6	4	6	4	4	2	3	2	3	5	5	5	4	5	5	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	6	5	5	6	5	5	3	4	5	3	6	4	5	3	4	5	4	4	3	2	2	5	5	5	5	5
4	5	6	3	4	5	3	4	5	3	5	4	3	6	6	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5
4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	5	6	5	4	5	6	5	4	3	4	5	4	4	4	4
6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	3	5	4	3	5	4	5	4	6	2	4	5	4	3	3	4	5
6	5	5	4	4	4	5	6	6	5	4	4	4	3	3	3	3	4	5	6	6	6	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	6	6	6	6	4	4	4	4	4	6	6	5	6	4	4	4	5	6	4	4	3	4
5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	6	5	4	3	2	2	4	6	4	3	4
6	5	6	5	5	5	4	3	4	6	5	5	6	6	6	4	4	6	5	3	3	2	2	2	5	6	5
5	5	5	6	6	5	4	5	6	5	4	4	6	4	3	4	5	6	4	3	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	6	5	6	5	6	4	5	4
5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	6	4	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	4	5
6	5	5	5	5	6	6	6	5	5	3	4	3	3	5	5	5	4	4	4	5	5	5	6	5	4	4
4	4	4	4	5	5	5	6	6	5	4	5	4	5	3	5	5	5	5	3	3	3	2	3	4	5	5
6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	6	5	4	5	4	5	6	5	4	4	4	5	5	6	5	4

4	5	4	4	4	4	5	4	4	6	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6		
5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	4	3	4	5	4	5	6	5	4	4	5	4	4	4	4		
5	4	3	4	5	6	5	4	3	2	3	4	5	6	5	5	5	6	5	4	3	2	4	5	4	3	5	
4	5	4	3	4	5	6	5	4	3	4	5	6	5	4	5	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	
6	5	5	5	5	5	4	3	3	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	4	5	6	4	2	3	2
4	5	4	3	3	4	4	5	6	5	4	3	4	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	6	6	5	6	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	
5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	6	5	5	4	5	6	6	4	
5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5	
5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	
4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	6	5	5	4	4	3	4	4	5	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	6	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	6	6	6	6	
6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	3	6	6	6	4	5	6	6	6	4	4	4	4	6	6	6	6	
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5	5	4	
5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	6	6	6	6	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	6	6	6	6	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	2	2	5	6	6	4	
3	3	4	4	3	4	5	5	4	4	2	2	3	3	3	4	4	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	4	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	2	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	4	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	6	6	6	6	
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	6	6	6	6	
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	6	6	6	6
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6	5	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	
5	5	6	4	3	5	4	6	6	5	4	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	5	6	6	4	
4	4	4	5	3	3	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	6	5	5
5	3	4	3	2	5	5	4	6	6	2	3	3	4	2	5	5	5	5	4	2	2	1	3	6	6	6	5
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	3	3	5	6	3	6	6	6	6	6	2	4	1	3	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	3	3	5	6	3	6	6	6	6	6	3	4	1	3	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	6	6	4
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	2	4	4	5	5	3
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5
5	5	5	3	3	5	5	6	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	4	3	3	4	5	5	5	4
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	4	3	2	2	4	5	5	5
4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4
4	5	5	4	4	4	4	5	6	6	6	3	4	4	4	4	6	6	6	6	5	3	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	3	4	6	6	5	3	5	4	4	3	5	5	5	5	5	5	4	2	3	5	5	5	3
5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	6	5	6	6	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
5	5	6	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5

6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	5	6	6	5	5	4	5	5	6	6	5	6	5	5	6	6	4
4	4	6	5	4	5	4	5	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	5	6	5	5	6	5	6	6	6	5	5	6	5	6	6	5	5
6	6	5	6	5	4	4	4	3	3	5	6	5	5	5	3	6	5	6	4	4	4	4	6	6	5	5
6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	1	3	1	3	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Lampiran 4 Hasil Analisis Data



Model Penelitian

	NW	PCR	PH	R	SPA	TKK	R x PCR
NW1	0.877						
NW2	0.899						
NW3	0.808						
NW4	0.862						
NW5	0.822						
PCR1		0.820					
PCR2		0.877					
PCR3		0.754					
PCR4		0.810					
PCR5		0.843					
PH1			0.727				
PH2			0.808				
PH3			0.820				
PH4			0.809				
PH5			0.769				
R1				0.859			
R2				0.907			
R3				0.855			
R4				0.751			
SPA1					0.727		
SPA2					0.770		
SPA3					0.787		
SPA4					0.848		
TKK1						0.782	
TKK2						0.885	
TKK3						0.866	
TKK4						0.838	
R x PCR							1.000

Outer Loading

Discriminant validity - Cross loadings							
	NW	PCR	PH	R	SPA	TKK	R x PCR
NW1	0.877	0.378	0.346	0.220	0.343	0.345	0.093
NW2	0.899	0.477	0.355	0.259	0.364	0.390	0.177
NW3	0.808	0.401	0.410	0.184	0.268	0.380	0.190
NW4	0.882	0.417	0.379	0.297	0.296	0.383	0.153
NW5	0.822	0.426	0.324	0.165	0.297	0.336	0.104
PCR1	0.408	0.820	0.234	0.252	0.108	0.380	0.187
PCR2	0.455	0.877	0.290	0.291	0.194	0.336	0.114
PCR3	0.405	0.754	0.355	0.329	0.321	0.331	0.208
PCR4	0.377	0.610	0.364	0.304	0.321	0.242	0.089
PCR5	0.371	0.643	0.286	0.149	0.187	0.350	0.198
PH1	0.400	0.363	0.727	0.199	0.301	0.284	0.036
PH2	0.334	0.281	0.808	0.135	0.278	0.362	0.000
PH3	0.291	0.295	0.820	0.201	0.409	0.378	0.054
PH4	0.306	0.259	0.809	0.211	0.268	0.331	-0.069
PH5	0.310	0.237	0.769	0.265	0.302	0.301	0.005
R1	0.283	0.292	0.212	0.859	0.274	0.308	-0.062
R2	0.188	0.271	0.240	0.907	0.246	0.215	-0.075
R3	0.211	0.286	0.233	0.855	0.253	0.190	-0.060
R4	0.186	0.240	0.183	0.751	0.210	0.106	-0.004
SPA1	0.172	0.189	0.338	0.210	0.727	0.251	-0.008
SPA2	0.246	0.162	0.368	0.167	0.770	0.129	0.116
SPA3	0.233	0.170	0.313	0.251	0.787	0.143	0.080
SPA4	0.407	0.291	0.263	0.277	0.848	0.252	0.169
TKK1	0.248	0.299	0.289	0.224	0.213	0.782	0.093
TKK2	0.446	0.403	0.420	0.316	0.274	0.885	0.102
TKK3	0.322	0.326	0.331	0.136	0.130	0.886	0.175
TKK4	0.381	0.305	0.328	0.165	0.208	0.838	0.039
R x PCR	0.166	0.193	0.008	-0.062	0.136	0.118	1.000

Cross Loading

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
NW	0.907	0.909	0.931	0.730
PCR	0.879	0.883	0.912	0.675
PH	0.847	0.850	0.891	0.620
R	0.886	0.895	0.908	0.714
SPA	0.803	0.886	0.864	0.615
TKK	0.887	0.900	0.908	0.712

Construct Reliability and Validity

R-square - Overview			
	R-square	R-square adjusted	
NW	0.374	0.348	

R-Squared

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion							
	NW	PCR	PH	R	SPA	TKK	
NW	0.854						
PCR	0.493	0.822					
PH	0.425	0.366	0.787				
R	0.265	0.325	0.257	0.845			
SPA	0.368	0.273	0.395	0.295	0.784		
TKK	0.430	0.400	0.413	0.255	0.250	0.844	

Diskriminant validity – Fornell-Larcker criterion

MV prediction summary - Overview

	O ² predict	PLS-SEM_RMSE	PLS-SEM_MAE	LM_RMSE	LM_MAE
NW1	0.169	0.690	0.504	0.725	0.529
NW2	0.264	0.624	0.433	0.660	0.466
NW3	0.221	0.662	0.482	0.747	0.550
NW4	0.224	0.698	0.497	0.745	0.534
NW5	0.183	0.812	0.621	0.863	0.640

PLSpredict

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
PCR → NW	0.287	0.294	0.088	3.246	0.001
PH → NW	0.170	0.172	0.074	2.303	0.021
R → NW	0.039	0.041	0.066	0.593	0.553
SPA → NW	0.154	0.157	0.078	1.979	0.048
TKK → NW	0.188	0.184	0.095	1.989	0.047
R x PCR → NW	0.069	0.077	0.066	1.044	0.296

Hasil Uji Hipotesis